

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

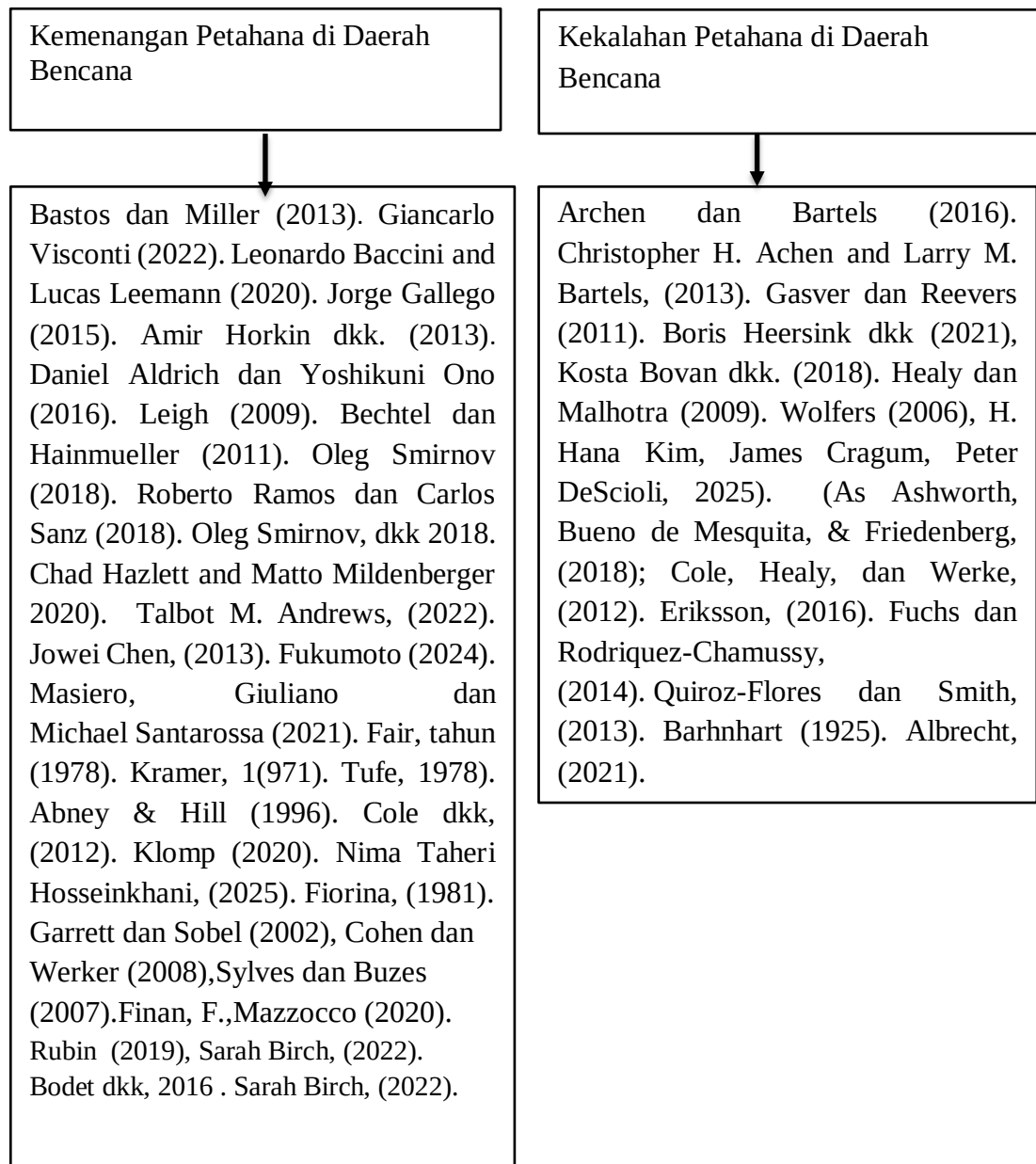
Bab ini mempertajam kedalaman literatur review yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kedalaman studi literatur yang penulis jelaskan sesuai dengan artikel dan penulisnya dalam merefleksikan dinamika elektoral pada masa krisis dengan melihat bagaimana dalam kontestasi politik terjadi. Pada bagian ini penulis membagi menjadi 2 (dua) sub bab, yakni fenomena kemenangan petahana dan kekalahan petahana sebagai objek penelitian. Literatur review pada bab ini merupakan kelanjutan dari penguatan konsep pada bab penelitian sebelumnya. Penelitian disertasi tidak cukup hanya berbasis pada studi literatur saja tetapi didukung oleh kerangka teori dan konsep pendukung untuk menganalisis pada disertasi ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Sub bab pada bagian ini menguraikan mengenai studi literatur terhadap referensi yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam penelitian. Penelitian ini memetakan literatur tersebut berdasarkan 2 (dua) kategori yakni: *pertama*, fenomena kemenangan petahana dalam dinamika Pemilihan Kepala Daerah, dalam situasi bencana. Kedua, memotret fenomena kekalahan petahana dalam dinamika Pemilihan Kepala Daerah dalam situasi bencana. Fokus penelitian ini pada kategori yang kedua yakni melihat bagaimana kontestasi politik dan bencana diasosiasikan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan dukungan publik berdasarkan kinerja pada masa pemulihan pasca bencana terjadi.

Pemetaan literatur review dalam sebuah penelitian menjadi hal penting untuk dilakukan dalam rangka menyajikan hasil kajian terdahulu sebagai pedoman untuk melakukan pendalaman terhadap studi yang serupa dengan tujuan untuk meletakkan penelitian penulis dalam perspektif yang mana. Berikut dapat dilihat hasil pemetaan literatur review dari peneliti:

Bagan. 2.1 Bagan Pemetaan Literatur Review



Sumber: Data Diolah, 2024.

Pemetaan literatur review dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian yang sejenis ataupun yang memiliki korelasi dengan tema dari penelitian yang peneliti kaji. Hasil pemetaan menunjukan bahwa penelitian yang berkaitan dengan pemilu dan bencana menemukan 2 (dua) teori besar yaitu, pertama, “Retrospeksi Penuh Perhatian” dapat memberikan efek positif terhadap petahana dan kedua, “Restropeksi Buta” dapat memberikan efek negatif terhadap petahana, dengan menghukum petahana dari hasil penilaian terhadap kinerja pada saat penanganan berlangsung.

2.1.1 Kemenangan Kandidat/Petahana Dalam Pemilu Pada Situasi Bencana.

Dinamika kemenangan petahana pada Pemilihan Kepala Daerah, baik itu dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung di antaranya, Penguasaan sumber daya secara politik maupun adanya kekuatan lokal dalam membangun citra politik. Model pertukaran kekuasaan dengan sumber daya ekonomi ini, bekerja dalam Serentak di Indonesia tahun 2015 dan 2017 dan gelombang Ketiga pada tahun 2018. Kajian Hasrul Hanif (2009) menyebutnya dengan istilah “politik klientelisme baru di Indonesia”. Klientelisme menurut Hanif merupakan bentuk penguasaan sumber daya publik oleh minoritas elite negara dan pada saat yang sama ada ketergantungan klien terhadap sumber daya tersebut (Hasrul Sani, 2009).

Kajian yang dilakukan Leo Agustino (2010) tentang orang kuat lokal di Banten terdapat hubungan yang sangat kuat antara Tubagus Chasan Sohib dengan dinasti politik. Kajian serupa juga ditemukan pada penelitian Bambang Purwoko (2006:130) menemukan bahwa Sebagian besar orang kuat pertahanan berusaha merebut kekuasaan untuk periode berikutnya dan berhasil. Misalnya, Kemenangan di Kabupaten Kebumen, Pekalongan, Cilegon, Kutai Kartanegara. Bahkan,

langsung membuka ruang spekulasi akan banyak dimenangkan oleh para kepala daerah petahana yang sudah atau sedang menduduki jabatan ketika berlangsung.

Dalam kajian kemenangan petahana perkembangannya tidak hanya terkonsentrasi pada isu politik semata, namun juga terjadi pada konteks bencana. salah satu kajian mengenai pemilu dalam konteks bencana adalah yang dilakukan oleh Paulo Bastos dan Sebastian Miller (2013) memotret dengan sangat jelas bahwa deklarasi kekeringan yang dilakukan sebelum pertarungan politik dimulai, sesungguhnya memperkuat keuntungan *elektoral* dari walikota petahana di Brazil. Respons kebijakan terhadap kondisi cuaca ekstrem adalah tunduk pada pengaruh politik, dan memiliki efek penting pada kerja demokrasi institusi serta desain pengelolaan kegiatan terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Mechel dan Hainmueller (2011) menemukan bahwa pemimpin demokratis memperoleh imbalan politik jika mereka menunjukan kompetensi dalam menangani dampak dan memastikan kompensasi yang cepat atas kerusakan yang terjadi akibat banjir Elbe di Jerman 2002, sehingga dengan keadaan yang menguntungkan, pembuat kebijakan dapat menghasilkan rasa terimakasih pemilih yang bertahan lama. Upaya bantuan yang efektif oleh petahana dalam merespons situasi bencana dapat meningkatkan kinerja elektoral partai partai yang berkuasa (Cercua Et. Al 2023).

Amir Horkin dkk, (2013) mempertegas pernyataan dari Paulo Bastos dan Sebastian Miller dalam hasil penelitian bahwa kinerja kepala daerah pada saat darurat memiliki hubungan yang kuat antara kinerja dan peluang terpilih kembali pada situasi krisis kasus pada pemilihan pemerintahan lokal di Israel pada masa perang Lebanon kedua. Argumentasi tersebut diperkuat dengan hasil kajian yang

dilakukan oleh Daniel Aldrich dan Yoshikuni Ono (2016) menemukan bahwa semakin banyak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami dan alam teknologi yang mengakibatkan krisis bahan bakar pembangkit listrik yang terjadi pada tahun 2011, membuat intensitas politisi dan pemerintah semakin sering menjangkau jaringan yang luas dari koneksi yang memiliki potensi manfaat untuk mereka. Anggota dewan kota yang partisan dan independen berperilaku berbeda, mereka yang memiliki koneksi dengan partai yang berkuasa menjangkau lebih banyak orang dibandingkan mereka yang tidak memiliki koneksi.

Gagasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian sejenis yang dilakukan Visconti (2022), bahwa kerusakan material akibat alam di Chili meningkatkan kemungkinan pemilih memilih kandidat sayap kiri dan independen. Warga yang terkena dampak lebih cenderung memilih kandidat dengan ideologi yang dikaitkan dengan sikap, dan kebutuhan pasca bencana. Garrett dan Sobel (2002), bahwa politik mempengaruhi tingkat dan alokasi deklarasi bencana. Mereka juga memprediksi hampir setengah dari bantuan bencana dimotivasi secara politik bukan karena kebutuhan. Cohen dan Werker (2008). Setiap eksplorasi dampak bencana alam terhadap suatu perekonomian harus mempertimbangkan pengaruh politik dan bagaimana pengaruh tersebut dapat berdampak pada bantuan. Sylves dan Buzes (2007), faktor politik memang penting dalam keputusan pemimpin mengenai deklarasi bencana. Roberto Ramos dan Carlos Sanz (2018) menjelaskan bahwa kasus kebakaran hutan besar di Spanyol selama 1983-2011 yang tidak disengaja hingga sembilan bulan menjelang pemilihan lokal meningkatkan perolehan suara partai petahana hampir 8 poin persentase.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Leonardo Baccini & Lucas Leemann (2020), menemukan bahwa efek yang cukup besar untuk pemungutan suara pro iklim setelah mengalami banjir di Swis, petahana memperoleh dukungan berdasarkan perilaku terhadap kebijakan yang mengatasi perubahan iklim, pembagian suara yang mendukung kebijakan pro-iklim dapat meningkat sebesar 20 persen. Temuan ini berkontribusi pada literatur yang mengeksplorasi dampak kondisi lokal pada perilaku pemilu sebelum pemilihan dilakukan. Talbot M. Andrews, (2022), dalam temuannya menunjukkan bahwa pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran warga dalam konteks bencanapencegahan akan lebih mendapatkan dukungan atau kepercayaan dari publik, respons pemimpin terhadap situasi krisis dapat memperkuat relasi antara masyarakat dengan pemimpinnya. Strategi pemimpin dengan membangun terus publik dalam upaya pencegahan , akan memberikan keuntungan secara elektoral.

Smirnov dalam kajiannya menemukan bagaimana kelangsungan hidup politik para pemimpin di rezim politik yang berbeda dipengaruhi oleh kekeringan dan curah hujan banjir, yang merupakan dua dampak utama yang diantisipasi dari perubahan iklim antropogenik di seluruh dunia. banjir dapat meningkatkan pergantian politik melalui cara-cara reguler seperti pemilihan umum atau batas masa jabatan. Dalam konteks bencanabanjir, lembaga-lembaga politik memainkan peran yang lebih penting daripada pembangunan ekonomi untuk kelangsungan hidup politik para pemimpin (Oleg Smirnov, dkk 2018). Selaras dengan penelitian Smirnov. Chad Hazlett and Matto Mildenerberger, 2020, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan di California Amerika Serikat dapat

meningkatkan dukungan publik terhadap calon dari Partai Demokrat yang pro terhadap langkah-langkah pemungutan suara terkait iklim.

Bencana alam merupakan contoh nyata peristiwa katastrofik yang dapat mempengaruhi keputusan memilih. Dalam studinya, Masiero dkk (2021), menganalisis bagaimana terjadinya gempa bumi mengubah perilaku pemilih dalam pemilihan umum kota, dengan fokus khusus pada peran paparan media. Kajian mengeksplorasi data dari 13.338 siklus pemilihan kota di mana petahana mencalonkan diri kembali antara tahun 1993 dan 2015 di Italia. Penelitian menerapkan strategi perbedaan-dalam-perbedaan dengan efek tetap waktu dan kota terhadap probabilitas pemilihan kembali dan pangsa suara menggunakan tiga kelompok kontrol yang berbeda: seluruh kota, sub-sampel kota tetangga, dan sub-sampel kota yang diidentifikasi melalui prosedur pencocokan kecenderungan tetangga terdekat satu-satu. Hasil kajian menemukan bahwa terjadinya gempa bumi yang merusak secara signifikan meningkatkan peluang petahana untuk terpilih kembali dan pangsa suara mereka. Meseiro berpendapat bahwa hasil temuan didorong oleh keunggulan petahana dalam menawarkan pemulihan dari kerusakan yang dikombinasikan dengan visibilitas yang lebih tinggi di media setelah . Dengan demikian, relevansi media tik dari kejadian gempa bumi dapat membuat pemilih condong ke arah petahana.

Respons dari situasi pasca bencana yaitu para pemilih memberikan bentuk penghargaan terhadap pemerintah ketika respons yang diberikan memberikan dampak positif terhadap masa pemilihan (Fair, tahun 1978; Kramer, 1971; Tufe, 1978). Bukti empiris terbaru menunjukkan adanya imbalan elektoral yang tinggi terkait intervensi pasca. Studi-studi ini berargumen bahwa pemilih hanya memberi

sanksi kepada pejabat terpilih ketika mereka gagal mengatasi dampak negatif secara memadai. Ketika pejabat pemerintah bereaksi cukup cepat dengan memberikan bantuan darurat dalam jumlah besar kepada penduduk terdampak, para pemilih menghargai upaya tersebut. Bahkan, bantuan dapat meningkatkan prospek elektoral Cole dkk, (2012); Healy dan Malhotra, 2009; Reeves, 2011; Klomp, (2020).

Melengkapi penelitian serupa didapati pada penelitian Gallego, (2015:21) bahwa alam bermanfaat bagi para pemimpin dengan penjelasan bahwa pihak-pihak yang mengalokasikan bantuan secara strategis untuk mendapatkan suara pada pemilu menggunakan informasi dari Kantor Inspektur Jenderal Kolombia. saling terkait untuk kelangsungan hidup pemimpin melalui klientelisme, mereka menghasilkan aliran sumber daya dalam bentuk bantuan uang untuk membeli suara pemilih. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemilihan 2024 di Jepang bantuan pada korban bencana dapat memperkuat elektoral calon. Para calon dan politikus cukup hadir di lokasi bencana, dengan menggunakan kelengkapan atribut dan membantu secara langsung korban bencana seperti: mengangkut bantuan beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan cara merekam setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga terlihat para politisi benar-benar pro akan masyarakat terdampak bencana.

Jika kita melihat hasil kajian terdahulu di atas, bahwa dalam kontestasi politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas dan keberlangsungan demokrasi. Secara politik dapat dilihat bagaimana situasi dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan dukungan publik terutama oleh calon petahana dengan memanfaatkan momentum bencana dari berbagai perspektif, seperti: melakukan kampanye di daerah eks bencana, monopoli kebijakan untuk kepentingan secara

politik, distribusi bantuan kepada masyarakat korban bencana alam dan penguasaan mesin birokrasi.

2.1.2 Kekalahan Kandidat/Petahana Dalam Pemilu Pada Situasi Bencana.

Fenomena tumbangnya petahana pada Pemilihan Kepala Daerah, menunjukan bahwa dinamika politik mengalami perkembangan yang begitu komprehensif. Kajian tentang sirkulasi elite dengan terkonsentrasi pada kekalahan orang kuat petahana belum banyak dilakukan oleh peminat politik lokal. Sebagian besar karya masih berpusat pada pemahaman bahwa orang kuat petahana atau selalu menjadi pemenang dalam setiap kontestasi politik. Elite politik petahana berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan sangat kecanduan untuk tetap berkuasa. (Janet Biehl, 2015:189).

Kajian yang menjelaskan kekalahan orang kuat Petahana pada Blitar, Provinsi Jawa Timur, yaitu Muhtar Haboddin dan Ahmad Imron Rozuli (2020:183) menegaskan bahwa orang kuat petahana yang selama ini digambarkan sebagai elite politik yang selalu memenangkan kompetisi, pada kenyataannya tidak demikian. Kekalahan Rijanto sebagai orang kuat petahana merupakan buktinya. Strategi dengan melakukan koalisi besar dengan lintas ideologi partai politik pun tidak mampu mempengaruhi masyarakat secara maksimal. Kekalahan orang kuat petahana merupakan bentuk terjadinya sirkulasi elite dalam pemerintahan daerah.

Fenomena pemilu dalam konteks bencana dipotret dari dinamika kekalahan petahana yakni penelitian yang dilakukan oleh Heersink dkk. Penelitian dimulai dengan memberikan pertanyaan, apakah alam membantu atau merusak kekayaan *elektoral politisi*? penelitian menegaskan bahwa bertentangan dengan penelitian lainnya. Penelitian (Achen dan Bartels, 2016) sebelumnya menemukan bahwa

pemilih menghukum pejabat terpilih tanpa pandang bulu setelah kekeringan, Flu, dan serangan Hiu di Amerika Serikat yang di disebut dengan (retrospeksi buta). Healy dan Malhotra (2009) Pemilih memasukkan upaya bantuan dari pejabat terpilih dalam penilaian mereka (yaitu 'retrospeksi penuh perhatian') bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran bantuan dan dukungan partai petahana pasca bencana alam terjadi. sedangkan penelitian yang dilakukan Boris Heersink dkk di Amerika Serikat pada saat Pemilihan Presiden 2011, menemukan bahwa kandidat partai petahana tampil tidak lebih buruk di kabupaten kopartisan yang terkena dampak daripada di kabupaten kopartisan yang tidak terkena dampak, tetapi mereka berkinerja buruk di kabupaten yang terkena, kemenangan petahana ditentukan oleh sikap politik sebelumnya yang disebut dengan retrospeksi partisan (Heersink, 2022).

Bovan dkk, menemukan bahwa Pemilih dari daerah yang terkena banjir di Kroasia tahun 2014 dan 2015 mengurangi dukungan mereka terhadap pemerintah dan petahana (Presiden) yang sedang menjabat. Namun setelah dilakukan penelitian lanjutan dengan memperhitungkan variabel kontrol antara daerah yang terkena banjir, dampak banjir menghilang. Lebih jauh hasil menunjukkan bahwa baik keberadaan maupun jumlah pengeluaran bantuan pemerintah tidak berdampak pada perilaku pemilih. Kesimpulannya bahwa banjir tidak berdampak pada hasil pemilihan umum, dengan menggunakan model pemilih retrospeksi (Kosta Boan dkk, 2018).

Bencana alam yang terjadi merupakan sebuah peristiwa di luar kendali pemerintah, namun demikian pemerintah harus memberikan respons terhadap peristiwa tersebut, sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Distribusi

kebutuhan korban merupakan intervensi pemerintah secara penuh dalam masa pemulihan pasca bencana. Berdasarkan teori pemungutan retrospeksi berpandangan bahwa pemerintah maupun politisi memiliki tanggung jawab atas semua dampak dari alam. (Rodriguez-Chamussy, 2014; Quiroz-Flores dan Smith, 2013; Sejauh mana pemilih menyalahkan petahana tergantung pada berbagai faktor seperti bias partisan dan tanggung jawab hukum pejabat terpilih.

Petahana dapat dihukum tidak hanya terkait dengan persoalan distribusi bantuan saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pendapat Wolfers (2006) dan Leigh (2009) menunjukkan bahwa politisi petahana diberi penghargaan atau dihukum karena pergerakan ekonomi pada negara bagian yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang seharusnya (fluktuasi ekonomi) meski dianggap diluar pengaruh yang masuk akal. Healy dan Malhotra (2009) tidak menemukan bukti bahwa kerusakan akibat mempengaruhi suara calon presiden, namun menunjukkan adanya hubungan antara belanja bantuan dan dukungan terhadap partai presiden petahana.

Dalam analisis tingkat kabupaten terhadap pemilihan gubernur dan presiden dari tahun 1970 hingga 2006, meneliti peristiwa cuaca dan respons pemerintah menemukan bahwa pemilih menghukum presiden dan gubernur atas kerusakan akibat cuaca buruk. Dampak ini dikerdilkan oleh respons para pemilih yang penuh perhatian terhadap tindakan pejabat mereka. Ketika Presiden menolak permohonan gubernur untuk bantuan federal, Presiden dihukum dan Gubernur diberi penghargaan di tempat pemungutan suara. Para pemilih dapat memisahkan peristiwa acak dari respons pemerintah dan mengaitkan tindakan berdasarkan peran yang ditetapkan dari kedua politisi yang berbeda tingkatan (Gasveer dan Reeves, 2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Heersink dkk, menemukan ada pertimbangan tambahan yang mempengaruhi respons pemilih terhadap alam, kesamaan afiliasi partisan dengan pejabat terpilih menjadi faktor lain pemilih menentukan sikap politiknya. Keberpihakan berperan sangat kuat dalam respons pemilih terhadap kondisi alam. Dalam kasus Badai Sandy alam besar yang terjadi beberapa hari sebelum pemilihan Presiden tahun 2012 di Amerika Serikat menunjukkan reaksi para pemilih di daerah-daerah yang terkena dampak Badai Sandy sangat berbeda-beda tergantung dari keberpihakan yang sudah ada di daerah tersebut sebelum terjadi. Temuan Boris Heersink dkk, juga menunjukan bahwa para pemilih memasukkan kombinasi dan bantuan dalam pemilihan suara mereka, keberpihakan juga merupakan *prediksi* penting dalam temuan penelitian mereka (Boris Heersink, 2022). Teori yang digunakan oleh Boris Heersink dkk, dalam melihat fenomena alam apakah dapat membantu atau merusak kekayaan *elektoral* politisi yaitu Retrospeksi Partisan. Artinya pemilih memberikan penghargaan atau hukuman kepada petahana setelah terjadi, dipengaruhi oleh apakah pejabat tersebut merupakan rekan atau tidak. Reaksi pemilih terhadap kerusakan akibat sangat dipengaruhi oleh sikap keberpihakan yang sudah ada sebelumnya. (Heersink, 2022).

2.1.3 Peta Argumen Kemenangan atau Kekalahan Petahana Pada Situasi Bencana.

Bencana dalam kontestasi politik tidak selalu identik dengan peluang bagi kandidat pasangan calon dalam memenangkan kontestasi pemilihan seperti kebanyakan temuan dari para peneliti sebelumnya. Namun, kondisi juga dapat menjadi faktor penghambat calon baik itu petahana maupun penantang pada

kontestasi kekuasaan atau justru keberpihakan pemilih dalam menentukan sikap politiknya berdasarkan pada sikap retrospeksi partisan sebelum terjadi. Model teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis pada disertasi ini adalah teori dari Archen dan Bartels (2002, 2016), Bechtel dan Hainmueller, Healy dan Malhotra (2009), dan Boris Heersink dkk (2021) dan Kosta Bovan dkk, (2018), bahwa dalam situasi krisis pasca bencana, pemilih dapat memberikan beberapa keputusan pada hasil pemilu.

Pertama, Archen dan Bartels (2002, 2016), Gasveer dan Reeves (2011) telah mendirikan landasan teori untuk “Restrospeksi Buta”, menemukan bahwa terdapat hubungan (*korelasi*) antara dengan perilaku pemilih sebagai bentuk perlawanan (*resistensi*) terhadap pemerintah (peta hana), dimana pemilih menghukum kandidat dari partai petahana tanpa pandang bulu karena kejadian, seperti: serangan Hiu di pantai New Jersey dan kekeringan serta krisis pangan di beberapa wilayah. Para pemilih di Amerika Selatan setelah terjadi banjir Mississippi tahun 1927 menghukum kandidat petahana dari partai Republik Herbert Hoover yang secara pribadi bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasi bantuan pasca bencana pangan pemerintah Coolidge sehingga terhadap kejadian tersebut berdampak terhadap berkurangnya jumlah suaranya di negara-negara yang terkena dampak yang lebih banyak, sebesar 3 persen dari 10 poin. Beberapa variabel yang digunakan dalam melihat sikap pemilih pasca bencana yaitu: (1) Ketidakefektifan tata kelola oleh pemerintah (peta hana), (2) Distribusi bantuan pasca bencana oleh politisi dan pemerintah tidak sesuai harapan masyarakat, dan (3). Bantuan dari Program pemerintah tidak merata.

Kedua, Hainmueller (2011), Healy dan Malhotra (2009), Roberto Ramos san Carlos Sanz (2018), menegaskan teori “Retrospeksi Penuh Perhatian” bahwa terdapat hubungan (*korelasi*) positif antara belanja bantuan dan dukungan pemilih untuk partai petahana dalam pemilu. Pemilih melakukan introspeksi penuh perhatian terhadap petahana dengan memberikan penilaian terhadap pejabat (petahana) berdasarkan operasi bantuan yang dilakukan setelah terjadi. Adapun beberapa variabel yang digunakan untuk melihat hubungan tersebut yaitu: (1) kompetensi dalam menangani dampak dan memastikan kompensasi yang cepat, (2) Efektivitas tata kelola, (3) Deklarasi Pro terhadap isu bencana.

Ketiga, Heersink dkk, (2022), dan (Kosta Bovan dkk, 2018). Menegaskan bahwa terdapat hubungan (*korelasi*) antara dampak terhadap keberlangsungan politisi atau petahana dalam kontestasi politik. Namun, penambahan satu teori dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu “Retrospeksi Partisan” bahwa pemilih memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada petahana setelah terjadi dipengaruhi oleh apakah pejabat tersebut merupakan rekan atau tidak (partisan kekerabatan dan politik) sikap pemilih terhadap kerusakan akibat alam sangat dipengaruhi oleh sikap keberpihakan yang sudah ada sebelumnya, baik itu terhadap partai politik pendukung maupun calon petahana. Penggunaan variabel dalam melihat dukungan pemilih akibat dampak terhadap perolehan suara, yaitu: (1) Tingkat kerusakan akibat, (2) Kerusakan pada daerah co-partisan, (3) Perubahan Pendapatan masyarakat 1 tahun, (4) Perubahan tingkat pengangguran 1 tahun, (5) Perubahan Harga rumah, 2 tahun, (6) Kerusakan akibat 2 tahun, dan (7) Deklarasi, 2 tahun. Sedangkan variabel yang digunakan untuk melihat dampak kerusakan akibat terhadap perolehan suara petahana yaitu: (1) Kerusakan akibat yang terjadi;

(2) Deklarasi 6 bulan; (3) Turndown 6 bulan; (4) Kerusakan co-partisan; (5) Deklarasi Co-Partisan; (6) Penolakan Co-Partisan; dan (7) Rekan Partisan.

Keempat, Kim dkk. Dalam konteks bencana pemilihan pasca terjadi bencana, peserta tidak lebih mendukung bantuan daripada pencegahan; faktanya, mereka lebih menyukai pencegahan ketika warga negara tidak kooperatif. Selain itu, peserta kurang mendukung bantuan untuk warga yang tidak kooperatif dibandingkan dengan warga yang kooperatif, sementara kooperatif tidak mempengaruhi dukungan untuk kebijakan pencegahan (H. Hana Kim, James Cragun, Peter DeScioli, 2025). Dukungan terhadap pencegahan atau pro terhadap lingkungan menjadi perhatian publik terhadap pemerintah, termasuk terhadap warga masyarakat yang kooperatif terhadap situasi lingkungan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Bencana Sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan

Dalam pandangan (Dwi, 2009), bahwa bencana alam dipahami sebagai sebuah peristiwa yang dapat menyebabkan gangguan tatanan kehidupan sosial masyarakat baik itu oleh faktor alam maupun non alam termasuk juga akibat dari perbuatan manusia yang menyebabkan berbagai kerusakan dan kerugian termasuk juga korban jiwa serta dampak secara kejiwaan manusia (psikologis). Dampak akibat bencana alam tidak hanya pada sektor fisik dan non fisik semata, namun dinamikanya sudah merasuk pada tatanan terhadap proses demokrasi yang berlangsung pada suatu negara seperti Indonesia yang rawan akan terjadinya berbagai bencana alam.

Fenomena kontestasi kekuasaan selama ini terkonsentrasi pada isu-isu dominasi kekuasaan yang bersifat prediktif, artinya faktor-faktor yang dapat mendukung kemenangan ataupun kekalahan calon pada sudah dapat diprediksi, misalnya, dengan menggunakan sumber daya politik dengan mempromosikan kebijakan kepada masyarakat, mobilisasi aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan calon (politisasi birokrasi), dan pengerahan orang kuat lokal pada perhelatan pesta demokrasi lokal di daerah-daerah. Menurut Anna, bahwa kemenangan dari petahana di berbagai wilayah di Indonesia dalam pertarungan politik lokal di sebabkan oleh isu utama yaitu pelaksanaan dari wujud kekuasaan teori *powercube* yang dapat di analisis dengan melihat kekuasaan yang nyata atau *visible power* merupakan sebuah peluang untuk meyakinkan publik dengan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan sebagai sebuah investasi politik elektoral dari para kandidat yang bertarung pada arena kekuasaan lokal (Anna Yulia Hartati 2020).

Dalam perkembangannya isu bencana semakin mendapatkan perhatian khusus oleh banyak sarjana politik terutama terkait dengan bencana dalam kontestasi politik. Drazen (2000) melihat bahwa para pemilih saat ini dapat menyimpulkan lebih banyak tentang kompetensi pemerintah dengan cara mengamati respons negara terhadap suatu kondisi krisis dibandingkan dengan indikator lain seperti pergerakan siklus bisnis atau anggaran yang dilanda banyak inferensi. Temuan Achen dan Bartels (2004), dalam konteks bencana India bahwa pejabat terpilih mempunyai nasib yang lebih buruk ketika alam. Rata-rata, partai petahana yang mencalonkan diri kembali akan mendapatkan hukuman karena cuaca buruk, meskipun itu di luar kendali mereka.

Ketidakmampuan dalam merespons situasi justru menjadi ancaman bagi politisi petahana yang seharusnya kondisi dapat meningkatkan peluang terpilih kembali jauh lebih besar daripada calon politisi yang bukan dari partai penguasa atau petahana. Amir Horkin dkk (2013) bahwa kinerja kepala daerah pada situasi darurat memiliki hubungan yang kuat antara kinerja dan peluang terpilih kembali. Artinya bahwa dengan kekuatan yang dimiliki oleh politisi petahana seharusnya mampu menjadikan situasi sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan.

Shown Cole (2012) menjelaskan secara keseluruhan telah menyatukan hasil temuan-temuan literatur mengenai pemberian bantuan dalam demokrasi dan irasionalitas pemilih. Dalam konteks bencana demokrasi, pemerintah merespons krisis dengan bantuan yang disediakan pemerintah, namun sejauh mana bantuan tersebut tergantung pada kemungkinan kembalinya pemilu. Besley dan Burgess (2002) mencatat bahwa pemerintah lebih berperan dan murah hati dengan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang melek huruf dan daerah-daerah yang mempunyai lebih banyak media. Misalnya strategi ini berpengaruh pada kecerdasan dan kewaspadaan pemilih.

Tata Kelola pemilu dalam konteks bencana harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan meskipun dapat ditarik sebagai ajang kontestasi kekuasaan, distribusi bantuan kepada pemilih yang terdampak alam harus dilakukan dengan asas pemerataan bukan atas dasar keuntungan secara personal maupun kelompok, bahwa distribusi bantuan pemerintah berdasarkan pada pertimbangan secara irasional.

Dalam situasi (krisis) peran pemerintah dan politisi harus mempertimbangkan asas kemanusiaan (*Humanity*) di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, karena pada dasarnya keberadaan negara adalah memberikan fasilitas terbaik bagi warga

negaranya dalam kondisi apa pun. Hasan (2023), politik kemanusiaan cenderung dianggap sebagai upaya-upaya unit politik tertentu atau negara untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai kepentingan dalam kebijakan yang diklaim berdasar pada kemanusiaan. Sementara politik menunggangi aksi kemanusiaan dianggap sebagai upaya untuk mencapai kepentingan politik melalui tindakan kemanusiaan (Barnett, 2011). Wolfgang Friedman, menyatakan bahwa fungsi negara secara ideal dalam situasi adalah: sebagai penyedia; pengatur, dan sifat wajibnya yaitu mensejahterakan, dan; menjadi juri atau penengah. Dalam penanggulangan semestinya negara menerapkan keempat fungsi tersebut dengan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan terhadap rakyat dalam kondisi normal (Geneng Dwi Yoga Isnaini dkk. 2009. Penjelasan fungsi negara dalam situasi menurut Wolfgang Friedmann, yaitu:

- (1) Fungsi *regulator*: Negara sebagai regulator, idealnya berlandaskan semangat memperoleh solusi terbaik dalam mengatur segala hal yang terkait dengan penanggulangan. Namun yang terjadi, negara dijadikan alat oleh mereka sebagai regulator justru lebih condong sebagai satpam dengan pentungan di tangan dalam menertibkan upaya-upaya penanggulangan terutama dalam hal penyaluran bantuan kepada korban.
- (2) Fungsi sebagai *provider*: terutama dalam hal penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, tempat tinggal) yang menjadi jaminan korban untuk dapat melanjutkan hidup. Se jauh ini masih sering terjadi kesimpangsiuran dalam penanganan korban terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Saling lempar tanggung jawab serta saling menyalahkan antar institusi masih juga sering terjadi. Ini menggambarkan lemahnya koordinasi yang

terbangun dalam situasi. Selain itu sebagai provider, negara wajib melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah/korban. Upaya rehab dan rekonstruksi ini harus steril dari berbagai kepentingan yang berpotensi merusak semangat kemanusiaan. Sementara kita tahu bahwa berbagai macam pengadaan barang dan jasa yang di peruntukan bagi korban justru menjadi semacam “proyek” pencairan anggaran keuangan negara baik pusat maupun daerah. Terutama untuk proyek-proyek yang fisik yang memang mensyaratkan proses tender untuk nilai tertentu.

- (3) Fungsi sebagai *umpire* (penengah), dalam penanggulangan, pemerintah mewakili negara mengantisipasi berbagai potensi kerusuhan dan kericuhan yang timbul akibat memanasnya tensi emosi rakyat di daerah lokasi. Potensi kerusuhan ini harus menjadi perhatian utama, sebab korban bisa dengan mudah terpengaruh kemarahannya karena sebab yang paling kecil sekalipun, apalagi jika sudah menyangkut soal pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi yang diperlukan adalah perlakuan yang adil kepada korban.

Dalam kondisi emosi korban yang tidak stabil, negara harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban. Negara harus tampil ke depan sebagai *pioneer* dalam menangani segala persoalan hidup yang dihadapi korban. Negara harus menjunjung semangat keadilan dalam memperlakukan korban. Prioritas yang paling sering diberikan kepada anak-anak, lansia dan wanita memang menjadi perhatian pokok. Selain kepada 3 hal tersebut keadilan dalam segala hal harus diterapkan secara ketat. Sebab perlakuan yang berbeda sedikit saja dalam memantik

emosi korban sekaligus dapat memicu terjadinya kericuhan bahkan kerusuhan dalam skala besar. Kekhawatiran besarnya adalah apabila kerusuhan tersebut terjadi diantara sesama korban. Konflik horizontal dapat terjadi diantara sesama korban krisis saat. (Dwi, 2009).

Isu bencana saat ini tidak hanya dipahami dari sisi lingkungan (*ekologi*) dan kemanusiaan (*humanity*), namun juga sudah mendapatkan perhatian khusus terhadap demokrasi. Salah satu kajian yang menarik dari Lin adalah bagaimana terdapat pola keterkaitan antara kondisi bencana alam, lingkungan dengan demokrasi yang bisanya menjadi sebuah kajian terpisah tetapi studi ini meleburkan ketiga kajian tersbut dalam satu dimensi keilmuan yaitu bencana dan demokrasi yang lebih luas. Dalam pandangannya lin menjelaskan bahwa negara yang mampu melaksanakan system demokrasi yang baik akan lebih menjamin jumlah korban lebih sedikit dibandingkat dengan system negara yang kualitas demokrasinya di bawah standar. Kondisi ini berlaku pada bencana yang bersifat prediksi seperti, badai, banjir, angin muson serta bencana lainnya. Kondisi negara condong otoriter memimpin biasanya memiliki kafasitas yang lemah dan akan berdampak buruk pada kondisi kerentanan masyarakatnya ketika menghadapi situasi krisis bencana (Hong Lin, 2015). Keterangan Lin juga menjelaskan bahwa kondisi lingkungan di Indonesia akan berpengaruh pada demokrasi negara itu sendiri. Beberapa kasus yang dipakai sebagai data empiris misalnya kasus kebakaran hutan dan banjir yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Bencana merupakan sebuah konsekuensi dari kerusakan tata kelola yang tidak berbasis pada kebutuhan dan peruntukan yang seharusnya tetapi merupakan praktik klientalisme

yang nyata serta terdapat kelemahan pada pengawasan publik yang lemah (Wijayanto dkk.2021).

Pemilihan pada masa transisi pasca bencana dapat menjadi ajang kontestasi kekuasaan para kandidat baik itu petahana maupun penantang untuk meraih simpati publik, masa transisi pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai proses pemulihan secara fisik dan tetapi juga bagaimana proses masa *recovery* mempertimbangkan keberlangsungan demokrasi melalui instrumen pemilu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Situasi tentunya memberikan ruang dan peluang tidak hanya bagi petahana tetapi juga bagi pasangan calon penantang, semua pada akhirnya tergantung pada strategi masing-masing calon dalam melakukan pendekatan kepada pemilih pada situasi. Pandangan Chen (2013), terlepas dari ideologi pemilih, penyaluran bantuan pra-pemilu merupakan sinyal informatif yang meningkatkan keyakinan pemilih bahwa petahana akan kembali memberikan bantuan di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan keyakinan ini selalu meningkatkan utilitas yang diharapkan pemilih dari terpilihnya kembali petahana tersebut. Apakah peningkatan keyakinan ini meningkatkan atau menurunkan partisipasi pemilih bergantung pada preferensi ideologis pemilih terhadap kedua kandidat. Jika pemilih berhaluan kanan dan sudah lebih menyukai petahana berdasarkan ideologi, peningkatan keyakinan yang dipicu oleh bantuan ini justru memberikan motivasi tambahan untuk berpartisipasi dan memilih kembali petahana tersebut. Pemberian bantuan Pra-pemilu kepada pemilih sayap kiri meningkatkan persepsi pemilih terhadap petahana, sehingga mengurangi motivasi pemilih untuk menggulingkan petahana

Sikap pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya, penilaian terhadap politisi atau pejabat petahana dalam merespons kondisi adalah cara yang paling efektif untuk memberikan penilaian terhadap kinerja mereka pada masa krisis bencana. Jika dianggap bahwa pejabat petahana tidak memberikan keberpihakan atau kontribusi terhadap dampak dari maka pemilih akan memberikan hukuman (restropeksi buta) kepada pejabat atau politisi petahana (Bartels, 2002, 2016), namun, jika respons dari pejabat atau politisi petahana memberikan kebermanfaatan yang besar kepada mereka maka akan memberikan penghargaan (retrospeksi penuh perhatian) kepada pejabat atau politisi petahana. Penghukuman ataupun penghargaan terhadap petahana sangat ditentukan dari apa yang sudah dilakukan pada waktu masa pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, kondisi masa pemulihan akan menjadi faktor penentu kemenangan ataupun kekalahan petahana pada masa pertarungan politik para kandidat.

2.2.2 Bencana Sebagai Peluang atau Batu Sandungan Dalam Kontestasi Politik.

Dinamika demokrasi pada kontestasi politik mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan berbagai isu yang terbangun termasuk salah satunya adalah isu bencana yang beberapa dekade ini semakin mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan ilmuwan sosial dan politik. Isu bencana yang pada awalnya dianggap berada pada kajian bencana dan ekologi mengalami pergeseran pada isu politik. Politisasi isu bencana semakin menguat bersamaan dengan semakin besarnya daya rusak dari bencana baik itu pada sektor perumahan, sosial, kesehatan dan sektor vital lainnya. Para politisi maupun kandidat menangkap adanya sebuah peluang besar pada setiap

kejadian bencana yang terjadi dengan memanfaatkan isu bencana sebagai isu politik yang dapat memperkuat elektoral para kandidat termasuk juga memperlemah elektoral kandidat.

Kondisi bencana biasanya di anggap sebagai sebuah kehancuran yang menakutkan dan dapat menghilangkan berbagai sumber daya. Distribusi kebutuhan kepada korban bencana dapat menjadi ruang memkuatbangun trus publik yang nyata ditengah situasi yang serba kekurangan. Media masa menjadi instrument yang paling efektif membangun praming guna memper legitimasi kekuasaan kepemimpinan seseorang. Rasa belas kasih pada korban bencana dijadikan sebagai tontonan yang terus di eksploitasi secara brutal sementara dasar persoalan terkadang dilupakan kalah dengan praming. Situasi bencana benar-benar menjadi alat afektif yang bersifar kolektif yang ditandai dengan bentuk ketergantungan terhadap kondisi dan rasa yang lebih nyaman. Pada tahapan seperti ini biasanta masyarakat akan menilai kepedulian dan keberpihakan seorang pemimpin sebagai akar penilaian mereka terhadap sikap politik, bukan pada isu kebijakan dan program ataupun rekam jejak melainkan wujud nyata kehadiran mereka di lokasi bencana (Kurniawan, 2025).

Fakta diatas dapat dijelaskan secara akademis denga melihat beberapa indikator utama yaitu, pertama moral yang bersifar licensing pada para politikus maupun simpatasan. Kedua, adanya sikap rasa empati dan merasakan kondisi orang lain atau *affect heuristic*. Bahwa kedua teori tersebut memiliki ketergantungan satu sama lain dan melahirkan sebuah siklus yang mapan.

Keadaan bencana terkadang terkoneksi dengan berbagai kepentingan politik para elit dan bahkan tidak jarang pula memainkan peran sesuai dengan kebutuhan politik sesaat, termasuk tidak mengindikasikan aspek regulasi dan struktur tata laksana yang diatur regulasi dan kebijakan pemerintah. Terkadang penegakan hukum yang menjadi dasar melaksanakan kebijakan terhadap situasi deforestasi, system pengawasan dan berbagai hal lainnya terkadang luput dari kontrol. Situasi bencana akan bernilai positif bagi para politikus untuk mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan situasi sebagai alat mendapatkan dukungan publik. Hadir pada wilayah-wilayah terdampak bencana merupakan wujud kepedulian yang nyata dan publik dapat memberikan penilaian atas apa yang dilakukan oleh para politisi, apakah berpihak pada kondisi mereka atau justru tidak berpihak pada masyarakat. Kondisi ini bisa menjadi jalan pintas para kandidat mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik dengan nilai ekonomi politik yang dianggap paling murah menyakinkan publik (<https://theconversation.com>).

2.2.2.1 Bencana Dapat Menjadi Peluang Bagi Petahana Pada Pilkada

Perkembangan isu bencana terus mengalami pergeseran yang begitu cepat, tidak hanya pada implikasi akibat yang dirasakan seperti korban jiwa, kerusakan bangunan namun sudah berdampak terhadap hasil pemilu melalui arena kontestasi kekuasaan. Bastos dan Miller (2013) memotret dengan sangat jelas bahwa deklarasi kekeringan yang dilakukan sebelum pertarungan politik dimulai sesungguhnya memperkuat keuntungan *elektoral* dari Walikota petahana di Brazil. Respons kebijakan terhadap kondisi cuaca ekstrem adalah tunduk pada pengaruh politik dan memiliki efek penting pada kerja demokrasi institusi serta desain dan pengelolaan kegiatan terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Taheri

(2006), bencana alam dapat menciptakan keuntungan secara struktural bagi petahana melalui mekanisme seperti efek penantang bayangan, dapat melindungi tata kelola yang buruk dari sanksi elektoral.

Membangun isu bencana pada situasi krisis tentunya dapat menjadi ruang dan peluang bagi para kandidat untuk meyakinkan publik dengan citra diri para calon dengan berbagai cara. Bansos menjadi senjata jitu untuk mendekatkan diri pada pemilih termasuk menjanjikan berbagai perbaikan terhadap kondisi masyarakat yang berada pada keadaan darurat di daerah terdampak bencana alam. Peluang petahana dalam memenangkan pertarungan politik di daerah lebih terbuka bila dibandingkan dengan calon yang muncul pada saat proses pencalonan pasangan calon. Aldrich dan Yoshikuni Ono (2011) semakin banyak kerusakan semakin sering politisi menjangkau jaringan yang luas dari koneksi yang memiliki potensi manfaat untuk mereka secara politik. Monopoli sumber daya secara politik dan kebijakan oleh petahana tentunya menjadi modal yang besar untuk memenangkan kontestasi politik.

Durasi waktu yang terbangun untuk mendapatkan simpati pemilih begitu terbuka pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika semua tahapan dalam proses masa pemulihan dilakukan dengan pendekatan penuh perhatian maka peluang untuk memenangkan pertarungan untuk merebut kekuasaan akan sangat besar. Seperti apa yang disampaikan oleh Visconti (2022) pada penelitian menemukan bahwa kerusakan material akibat meningkatkan kemungkinan pemilih memilih kandidat sayap kiri dan independen. Warga yang terkena dampak lebih cenderung memilih kandidat dengan ideologi yang dikaitkan dengan sikap, dan kebutuhan pasca bencana.

Pada peristiwa krisis pemerintah tidak boleh mengabaikan berbagai hak publik akan rasa aman terhadap kondisi ekonomi, sipilm hukum dan berbagai hak lainnya. Semua hak tersebut tidak dapat dipisahkan dalam situasi apapun termasuk dalam keadaan darurat. Kehadiran negara sebagai pelindung dan pemberi rasa aman kepada warganya harus mampu berlaku adil dari semua hak yang wajib didapatkan. Oleh karena itu guna menjamin semua hak tersebut semua pihak harus mendukung melalui instrumen kebijakan baik nasional maupun pihak internasional harus ambil bagian dalam menjaga tatanan kedamaian bagi masyarakat yang terkena bencana alam. (Geneng Dwi Yoga Isnaeni dan dkk, 2009). Pemulihan masa darurat tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah yang terdampak bencana, namun juga menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah pusat maupun pihak international sebagai wujud rasa kemanusiaan.

Politisasi bencana dapat dipahami sebagai sebuah sikap dan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk juga oleh pemerintah dalam rangka mengelola bencana dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas. Misalnya, pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan dukungan moral dan psikologis kepada masyarakat pasca bencana. Semua langkah yang diambil oleh pemerintah tertuang di dalam kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik dalam situasi, seperti apa yang dijelaskan oleh Ramos (2018) bahwa kasus kebakaran hutan besar di Spanyol selama 1983-2011 yang tidak disengaja hingga sembilan bulan menjelang pemilihan lokal meningkatkan perolehan suara partai petahana hampir 8 poin persentase. Ada dua (2) alasan mengapa kebakaran hutan bisa menjadi kejutan yang positif, yaitu:

- (1) Kota yang terkena dampak menerima bantuan kebakaran, bantuan ini mengimbangi dampak negatif dari kebakaran. Namun, bantuan disetujui oleh pemerintah pusat dan daerah, bukan daerah, sehingga tidak jelas mengapa pemerintah daerah yang memperoleh suara. Selain itu, temuan juga menemukan bahwa bantuan nasional: (a) bantuan terlalu umum, (b) bantuan membutuhkan waktu untuk disetujui, sehingga banyak kebakaran yang mendekati pemilu dan menguntungkan petahana belum menerima bantuan sama sekali, (c) tidak ada bukti bahwa pemerintah kota menerima lebih banyak menerima bantuan pada tahun pemilu;
- (2) Pemerintah daerah menggunakan api untuk mengubah zonasi lahan yang terbakar menjadi lahan perkotaan atau lahan yang dapat dikembangkan, dan hal ini dapat menimbulkan dampak kekayaan melalui peningkatan nilai lahan.

Kemampuan calon kepala daerah petahana membangun citra diri positif di daerah merupakan peluang untuk meyakinkan pemilih bahwa calon petahana merupakan pro terhadap masyarakat yang terdampak. Mechel dan Hainmueller (2011), misalnya menemukan bahwa pemimpin demokratis memperoleh imbalan politik jika mereka menunjukkan kompetensi dalam menangani dampak dan memastikan kompensasi yang cepat atas kerusakan yang terjadi akibat bencana, sehingga dengan keadaan yang menguntungkan, pembuat kebijakan dapat menghasilkan rasa terima kasih pemilih yang bertahan lama (retrospeksi penuh perhatian) Bechtel dan Hainmueller (2011), Healy dan Malhotra (2009).

Menurut teori “pembaharuan rasional”, yang baru-baru ini diinformasikan dalam model oleh Ashworth, De Mesquita, dan Fredenberg (2017), adalah rasional bagi pemilih untuk mengubah perilaku memilih mereka setelah guncangan, bahkan jika hal tersebut berada pada luar kewenangan mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab. Argumentasinya adalah bahwa guncangan dapat membantu mengungkap (atau membungkam) kualitas petahana, misalnya melalui respons yang diberikan terhadap masa pemulihan pasca bencana terjadi. Respons akan memberikan keputusan penghuman atau penghargaan bagi petahana.

Pendekatan politik seharusnya menjadi lazim dilibatkan dalam penanganan bencana, karena tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa di dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan berbagai kajian keilmuan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita bendung lagi untuk menjawab tantangan dan persoalan sosial masyarakat termasuk bencana. Komitmen politik menentukan kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi risiko dan ancaman dari suatu alam. Komitmen politik diterjemahkan sebagai bentuk kemauan dari pemimpin yang akan mengambil keputusan dan kebijakan publik, baik itu pada level presiden sampai jajarannya ke bawah (*eksekutif*) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*). Khaldun, melihat bahwa sikap politik harus berada pada dua sisi yang saling mengikat yaitu rasa kemanusiaan dan sikap politik yang berdasarkan pada etik dan moral (Khaldun, 2011).

Bencana alam dapat menjadi peluang bagi petahana untuk melanggengkan kekuasaannya apabila masa transisi pemulihan pasca bencana mampu dikelola dengan baik. Penanganan bencana akan menjadi isu yang paling sering dijadikan materi kampanye menyasar pemilih. Kebijakan yang diambil oleh petahana pada

saat menjabat sebagai kepala daerah akan menjadi dasar memperkuat atau memperlemah elektoral petahana. Kebijakan yang berporos pada kebutuhan publik merupakan refkelsi dari cerminan seorang pemimpin yang memiliki komitmen terhadap aspirasi publik. Kemenangan Azwar dan Risma menunjukkan jika kepemimpinan yang didasari respons positif dan kebaikan akan berdampak pada kekuatan elektoral publik yang mengikat empati pemilih. Sudah menjadi hal yang biasa ketika kandidat petahana mampu memenangkan pertarungan politik dalam kontestasi karena memiliki sumber daya dukung yang mapan sebagai motor penggerak mesin politik yang siap dijalankan. Tetapi jika respon petahana jauh dari harapan publik maka akan menjadi batu sandungan yang nyata termasuk juga akan mengakibatkan kekalahan (Suyatno, 2016).

Kemampuan petahana dalam melakukan manajemen isu bencana merupakan sebuah peluang untuk dapat memenangkan kontestasi politik. Tahapan masa transisi pemulihan di daerah membutuhkan dana dan waktu yang Panjang, sehingga kondisi tersebut seharusnya mampu dimanfaatkan oleh petahana untuk selalu hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin yang pro terhadap rakyatnya. Elektoral. Abney & Hill, 1996; Chen, (2008), (2013); Cole dkk., (2012); dan Klomp, (2020) menunjukkan bukti empiris terbaru menunjukkan adanya imbalan elektoral yang tinggi terkait intervensi pasca. Studi-studi ini berargumen bahwa pemilih hanya memberi sanksi kepada pejabat terpilih ketika mereka gagal mengatasi dampak negatif secara memadai. Ketika pejabat pemerintah bereaksi cukup cepat dengan memberikan bantuan darurat dalam jumlah besar kepada penduduk terdampak, para pemilih menghargai upaya tersebut. Bahkan, bantuan dapat meningkatkan prospek elektoral.

Masa transisi pasca bencana dapat menjadi peluang yang besar dalam kontestasi politik daerah dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang bersifat substansi dan teknis di lapangan. Narasi yang menjelaskan bahwa membawa berkah oleh berbagai pihak dapat menjadi gambaran kepada kita bahwa, dalam situasi ada peluang dan ruang yang bisa dimasuki secara dimensi politik dengan menggabungkan sisi kemanusiaan dan politik berjalan bersamaan seperti hasil temuan penelitian dari Paulo Bastos dkk, bahwa deklarasi kekeringan sebelum pemilihan dilakukan memperkuat keuntungan elektoral Walikota petahana Brazil (Paulo Miler, 2013). Kinerja kepala daerah pada saat darurat memiliki hubungan yang kuat terhadap peluang terpilih kembali, dengan pertimbangan bahwa petahana mampu mengelola kondisi dengan baik (Amir Horkin dkk. 2013). Berikut dapat dilihat indikator bencana dapat menjadi peluang dukungan politik pada masa transisi pemulihan pasca bencana:

Tabel. 2.1
Peluang Dukungan Politik Pada Masa Transisi Bencana

No	Indikator-Indikator Bencana Dapat Menjadi Peluang Dukungan Politik Pada Masa Transisi Pemulihan Pasca Bencana
1.	Kompetensi dalam menangani dampak bencana yang dimiliki oleh Kandidat/petahana;
2.	Memastikan kompensasi yang cepat bagi korban bencana;
3.	Efektivitas tata kelola penanganan bencana
4.	Proses penanganan bencana sudah efektif atau tidak
5.	Apakah petahana melakukan deklarasi terhadap sikap menyelesaikan isu bencana sebelum pemilihan dilakukan;
6.	Perubahan Pendapatan masyarakat 1 tahun
7.	Perubahan tingkat pengangguran 1 tahun

8.	Perubahan Harga rumah, 2 tahun;
9.	Deklarasi pro terhadap isu bencana sebelum pemilihan dilakukan
10.	Struktur anggaran penanganan pasca bencana berdampak terhadap kekalahan atau kemenangan petahana;
11.	Bantuan pemerintah untuk korban bencana, apakah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat
12.	Tingkat Kerusakan akibat bencana

Sumber: echtel dan Hainmueller (2011), Healy dan Malhotra (2009), Roberto Ramos san Carlos Sanz (2018)

Tata kelola bencana yang benar tidak hanya dapat meyakinkan publik terhadap proses penanganan bencana, namun juga mendapatkan kepercayaan masyarakat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam ilmu politik bencana tidak hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa alami, namun dapat dimaknai sebagai sebuah peristiwa politik yang dapat memberikan keuntungan secara elektoral. Kemampuan pemerintah/petahana dalam merespons kondisi krisis pasca bencana terjadi akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan sikap politiknya, apakah akan memberikan penghargaan atau justru penghukuman terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak memberikan manfaat kepada kepentingan publik.

2.2.2.2 Bencana Dapat Menjadi Batu Sandungan Bagi Petahana Pada Pilkada

Kajian tentang kontestasi politik dalam konteks bencana terkonsentrasi pada kekalahan petahana yang identik dengan orang kuat belum banyak dilakukan oleh peminat politik. Sebagian besar kajian berfokus pada pemahaman bahwa dengan kondisi bencana alam petahana menjadi pemenang setiap kontestasi politik. Elit

politik petahana berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan sangat kecanduan untuk tetap berkuasa (Biehl, 2015). Pemahaman ini terungkap dalam karya Bambang Purwoko yang mengatakan bahwa: “Sebagian besar orang kuat petahana berusaha merebut kekuasaan untuk periode berikutnya dan berhasil. Misalnya kemenangan di Kabupaten Kebumen, Pekalongan, Cilegon, Kutai Kartanegara. Bahkan, langsung membuka ruang spekulasi akan banyak dimenangkan oleh kepala daerah petahana yang sudah atau sedang menduduki jabatan Ketika berlangsung (Purwoko, 2006:130).

Dalam pandangan Kundhimiarso, ada beberapa penyebab kekalahan seorang incumbent diantaranya: (Suyatno, 2016, 226-227).

1. Ketenaran kandidat dan kesukaan publik tidak seimbang di hadapan publik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pandangan yang negatif dari sosok petahana itu sendiri, berkaitan dengan leadership maupun sikap etika dan moralitasnya pada saat menjadi pemimpin. Ketidaksukaan publik terhadap sikap pemimpin petahana akan terkonversi menjadi sebuah penilaian yang kuat dimata publik, bahwa kesan pemimpin yang memiliki watak arogansi dan sok kuasa serta memiliki batasan hubungan antara rakyat dan pemimpinnya akan menjadi persepsi kegagalan yang nyata terhadap petahana. Rasa tidak suka terhadap para kandidat dapat berasal dari sosok yang tidak mencerminkan suara publik, memiliki jarak serta dianggap otoriter dalam memimpin dapat menimbulkan ketidaksukaan terhadap para calon.
2. Ketidakpuasan publik terhadap calon selalu berujung pada penghukuman pada saat pemilihan, karena mereka punya daulat tertinggi untuk memberikan penilaian terhadap calon yang mereka kehendaki ataupun tidak di inginkan.

Petahana akan mendapatkan penghinaan apabila hasil kerja pada saat menjabat tidak memberikan dampak serius terhadap perubahan kehidupan masyarakat melalui kebijakan petahana.

3. Harapan publik untuk sebuah perubahan yang lebih baik tentunya akan menolak dengan lantang keberadaan situasi yang menguntungkan sekelompok elit yang berkuasa. Publik akan melakukan perlawanan terhadap petahana yang memiliki jiwa monopoli dan sikap yang tidak adil. Benturan kepentingan akan seolah-olah melahirkan dua kubu yang bertarung dengan memperlihatkan antara kekuatan kekuasaan vs kekuatan masyarakat sipil.
4. Posisi publik yang terus mengalami tingkat pemahaman yang baik secara rasional akan menentukan sikap politiknya berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan bukan lagi berkiblat pada partai politik maupun sosok calon semata namun lebih dari itu, apakah sikap politiknya akan memiliki dampak yang besar terhadap perubahan masyarakat dan pembangunan atau justru sebaliknya. Masyarakat kini melihat kepada capaian kinerja sebelum menjadi pemimpin yang tertuang pada pokok pikiran dan kerja nyata dari calon.

Krisis legitimasi dapat terjadi apabila pemerintah ingkar terhadap komitmen yang disepakati bersama dengan publik, ketika hal ini diingkari maka akan berdampak pada rasa kekecewaan yang besar serta kepercayaan publik akan menjadi hilang kepada pemerintah (Lucian w. Pye,197). Termasuk ketika pemerintah ataupun politisi petahana tidak mampu menepati janji maupun tidak mampu menyelesaikan isu bencana. Tingkat kesadaran publik terhadap politik memberikan ruang penghukuman bagi calon petahana yang tidak responsif terhadap tingkat kebutuhan masyarakat. Bentuk kekecewaan inilah yang mendasari

pemilih untuk menentukan sikap pada petahana maupun calon lain dengan cara memberikan hukuman.

Kajian Barnhart (1925) menunjukan bahwa, bencana alam tidak sepenuhnya berkelindan pada aspek secara ekonomi dan fisik semata namun juga dapat mengubah lanskap politik dengan mengurangi dukungan untuk pemimpin yang sedang menjabat. Pemilih memiliki berbagai cara untuk menghukum petahana, mulai dari perubahan preferensi politik hingga penggunaan suara dalam pemilihan. Ketidakpuasan terhadap kinerja dan respons terhadap krisis adalah faktor kunci dalam proses ini. Kegagalan petahana dalam masa pemulihan dapat memiliki konsekuensi serius bagi karier politik mereka. Respons yang lambat, kurangnya rencana yang jelas, dan ketidakpuasan masyarakat adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan dukungan dan kebangkitan partai alternatif.

Achen dan Bartels 2004, membangun argumen sederhana bahwa masa-masa sulit dapat mengancam keberadaan pemerintah menunjukkan bukti kemarahan warga secara retropektif. Ketika para pemilih kesakitan, mereka menendang pemerintah, membenarkan diri mereka sendiri dengan konstruksi budaya apapun yang masuk akal mereka. Di dalam banyak kasus petahana akan menanggung akibatnya saat pemilu berlangsung, bahkan dalam situasi obyektif, para pengamat hanya bisa menemukan sedikit dasar rasional untuk berasumsi bahwa para petahana punya adil dalam hal ini yaitu menimbulkan penderitaan terhadap pemilih.

Banjir, atau bencana alam lainnya dapat berakibat buruk sehingga kesempatan untuk dapat memberikan hukuman secara rasional terhadap politisi

petahana, baik karena politisi tersebut memang demikian bertanggung jawab atas beberapa kondisi yang diperburuk oleh petahana atau karena kegagalan dalam mengambil tindakan serta langkah-langkah yang memadai untuk memperbaiki dampaknya. Namun, tindakan ini jelas tidak masuk akal bagi para pemilih menghukum politisi petahana atas bencana alam kekeringan, banjir, atau bencana lainnya secara umum. Pemilih yang rasional harus menyadari bahwa persiapan dan reaksi petahana terhadap pemilu dislokasi fisik dan sosial yang besar akibat bencana besar, oleh karena itu, kita harus mengamati para pemilih yang rasional apakah memberikan penghargaan kepada petahana atas respons yang lebih baik dari rata-rata terhadap bencana alam seperti yang kita lakukan, amati bagaimana mereka menghukum petahana karena respons mereka yang lebih buruk dari rata-rata. Sebaliknya, catatan kami tentang retrospeksi buta menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi kapan pun memilih sedang kesakitan mereka akan menghukum pemerintah yang berkuasa, asalkan ada beberapa budaya yang kurang lebih masuk akal. Pemilu yang dilaksanakan dalam kondisi iklim yang relatif tidak menguntungkan bagi partai petahana (Christopher H.Achen dan Larry M.Bartels, 2004).

Pada kasus Pandemi Influenza tahun 1918, para pemilih menghukum pemerintah yang berkuasa kapan pun mereka merasa penting penderitaan yang dialami jutaan orang yang kehilangan teman atau anggota keluarganya karena influenza menghasilkan kekalahan telak terhadap petahana dalam sejarah pemilu Amerika. Tapi klaim hasil kajian yang dilakukan Achen dan Bartels (2004), bahwa hubungan dengan rasa sakit dan hukuman pemilu mengharuskan pemilih untuk membayangkan betapun masuk akal atau tidak masuk akalnya kondisi yang terjadi, bahwa para pemimpin yang berkuasa sebenarnya bisa mencegah atau meringankan

rasa sakit mereka. Dalam kasus pandemi flu, hal ini merupakan atribusi politik yang penting tanggung jawabnya kurang.

Dalam tulisan Tarquinio, (2020) menunjukkan bahwa beberapa daerah yang terkena dampak kekeringan, diharapkan peningkatan kesejahteraan mungkin tinggi, tidak menerima bantuan kekeringan sementara beberapa daerah yang tidak terkena dampak kekeringan menerima bantuan tersebut. Kajian tersebut menemukan bukti bahwa kesalahan alokasi dengan mengidentifikasi adanya hubungan positif antara bantuan dan produksi pertanian jika bantuan diberikan tepat sasaran. Sebaliknya jika distribusi bantuan tidak tepat sasaran maka akan terjadi hubungan yang negatif atau pemilih akan memberikan penghukuman terhadap pejabat petahana. Tarquinio memberikan model pemungutan suara probabilistik dinamis dalam penelitiannya sebagai kerangka untuk menilai potensi politisasi bantuan kekeringan di India Selatan.

1. Asumsi pertama, bahwa pemilih mengaitkan bantuan kekeringan dengan pemerintah negara bagian dan dengan demikian meningkatkan dukungan elektoral mereka terhadap dukungan elektoral pemilih partai yang berkuasa dinegara bagian jika mereka merima keringanan;
2. Adanya kejutan terhadap dukungan elektoral pemilih terhadap partai yang berkuasa di wilayah yang sebelumnya dimenangkan oleh partai yang berkuasa (daerah selaras), yang Saya menyebutnya sebagai efek petahana dari partai yang berkuasa;
3. Partai yang berkuasa kemudian memutuskan apakah akan mengalokasikan kekeringan atau tidak memberikan bantuan kepada masing-masing daerah dalam upaya memaksimalkan kemungkinan terpilihnya kembali wilayah

tersebut, dengan tetap memperhatikan biaya marjinal dalam memberikan bantuan.

As Ashworth, Bueno de Mesquita, & Friedenberg, (2018), melihat bahwa alam yang terjadi merupakan sebuah peristiwa di luar kendali pemerintah, namun demikian pemerintah harus memberikan respons terhadap peristiwa tersebut, sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Distribusi kebutuhan korban merupakan intervensi pemerintah secara penuh dalam masa pemulihan pasca. Berdasarkan teori pemungutan retrospeksi berpandangan bahwa pemerintah maupun politisi memiliki tanggung jawab atas semua dampak dari alam. Studi Finan dan Mazzocco (2020) alokasi dana pemerintah di negara bagian Brazil memperkirakan terjadinya distorsi yang besar daerah dengan tingkat keuntungan pemilu yang rendah namun diharapkan memperoleh keuntungan kesejahteraan yang tinggi.

Menurut Fuchs dan Rodriguez-Chamussy, (2014); Quiroz-Flores dan Smith, (2013), Sejauh mana pemilih menyalahkan petahana tergantung pada berbagai faktor seperti bias partisan dan tanggung jawab hukum pejabat terpilih. Pada teori ini pemilih menjadikan petahana atau pejabat yang berwenang sebagai pihak yang dievaluasi berdasarkan capaian kinerja mereka dalam memberikan keuntungan secara personal atau kelompok atau dapat dikatakan kebijakan pro masyarakat korban. Sedangkan Giancarlo Visconti (2022), menyajikan tiga hipotesis mengenai peran ideologi dalam pengambilan keputusan pemilu bagi korban:

- (1) Korban memprioritaskan kebijakan sosial setelah misalnya, memberikan perubahan baru, dan oleh karena itu akan lebih cenderung untuk memilih kandidat sayap kiri terkait dengan tindakan tersebut;
- (2) Masyarakat yang terkena dampak menginginkan pembaharuan ekonomi di wilayah mereka yang rusak, dan bagi hasilnya, mereka akan lebih cenderung memilih kandidat sayap kanan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi;
- (3) Di negara-negara yang berkembang, di mana negara mempunyai kapasitas yang terbatas untuk menangani guncangan negatif yang terjadi secara tiba-tiba, warga negara yang tidak terkena dampak kemungkinan besar akan merasa tidak puas dan frustrasi terhadap sistem politik, sehingga membuat mereka memilih kandidat independen yang tidak mewakili sistem politik tradisional.

Archen dan Bartels (2002, 2014, 2016), kegagalan para kandidat dalam pemilihan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, melainkan disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali pemerintah atau politisi secara teratur dapat mempengaruhi hasil sebuah pemilihan. Bencana alam, seperti kekeringan dan banjir, biasanya menyebabkan pemilih menyalahkan siapa pun yang menjabat pada saat itu. Pemilih menghukum petahana berdasarkan hasil penilaian mereka terhadap kinerja penanganan yang dianggap gagal atau tidak memiliki kebermanfaatan buat mereka. Heersink, Peterson, dan Jenkins (2017) menemukan dukungan untuk tesis Archen dan Bartel, yang memberikan bukti bahwa para pemilih menghukum Herbert Hoover secara luas ditempat pemungutan suara setelah banjir di Amerika Serikat pada tahun 1927. Demikian pula, Cole. Healy dan Werker (2012)

menunjukkan bahwa pemilih menghukum petahana dalam pemilu negara bagian setelah curah hujan di India. Healy, Malhotra, dkk. (2010) menemukan bahwa pemilih menghukum partai petahana dalam pemilihan Presiden atas kerusakan ekonomi akibat angin puting beliung. Beberapa indikator yang digunakan dalam melihat sikap pemilih pasca bencana yaitu:

- (1) Tidak efektifnya tata kelola oleh pemerintah dalam penyelesaian persoalan pemulihan ;
- (2) Distribusi bantuan pasca bencana oleh politisi dan pemerintah tidak sesuai harapan publik;
- (3) Bantuan dari Program pemerintah tidak menyasar korban bencana secara keseluruhan;
- (4) Dalam proses menentukan kebijakan tidak melibatkan publik;
- (5) Kecepatan dalam merespons situasi.

Salah satu alasan kenapa dinamika pada masa krisis bencana menemukan banyak fakta yang berbeda pada hasil penelitian sebelumnya adalah kebutuhan akan keberlangsungan hidup menjadi pilihan utama setiap manusia, pemenuhan akan makanan dan minuman serta hunian merupakan syarat yang wajib terpenuhi bagi masyarakat. Hal lain dapat menjadi pilihan kedua termasuk kebutuhan akan politik dan pengetahuan (Pals, 2012). Argumentasi sederhana tersebut memberikan pemahaman yang terang kepada kita semua bahwa pada masa krisis akibat dari memberikan peluang sekaligus tantangan bagi para politisi dalam arena kontestasi kekuasaan pada situasi bencana.

Tabel. 2.2
Bencana Menjadi Batu Sandungan Politik Petahana

No	Indikator Bencana Dapat Menjadi Batu Sandungan bagi Para Kandidat Dalam Pemulihan Pasca Bencana
1.	Tata kelola bencana yang tidak efektif: Manajemen bencana sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan bencana baik secara fisik maupun non fisik. Tata kelola bencana yang tidak efektif justru dapat mengerus kepercayaan publik sehingga berdampak terhadap pilihan politik.
2.	Distribusi bantuan pasca bencana oleh politisi dan pemerintah tidak sesuai harapan masyarakat: Pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana, harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, tidak hanya kebijakan yang bersifat tersalurkan saja.
3.	Bantuan dari Program pemerintah tidak menyeluruh: Bantuan pemerintah harus terdistribusi secara adil dan menyeluruh terhadap masyarakat sebagai korban bencana.
4.	Korban memprioritaskan kebijakan sosial setelah misalnya, memberikan perubahan baru, dan oleh karena itu akan lebih cenderung untuk memilih kandidat sayap kiri terkait dengan tindakan tersebut: Kebijakan pemulihan harus mempertimbangkan aspek-aspek perekonomian dan sosial publik
5.	Masyarakat korban bencana menginginkan pembaharuan ekonomi mereka yang rusak, dan hasilnya, mereka akan lebih cenderung memilih kandidat sayap kanan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi;
6.	Keterbatasan Sumber Daya Dalam Penanganan Bencana: Di negara-negara yang berkembang, di mana negara mempunyai kapasitas yang terbatas untuk menangani guncangan negatif yang terjadi secara tiba-tiba, warga negara yang tidak terkena dampak kemungkinan besar akan merasa tidak puas dan frustrasi terhadap sistem politik, sehingga membuat mereka memilih kandidat independen yang tidak mewakili sistem politik tradisional.
7.	Deklarasi pro terhadap penyelesaian isu bencana sebelum pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan: Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penanganan pasca bencana, apakah dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak.
8	Ketidakpuasan terhadap kinerja dan respons terhadap krisis dari pemerintah atau pejabat petahana: Respons pemerintah terhadap situasi krisis atau penanganan bencana.

9.	Struktur anggaran penanganan bencana tidak memadai : Apakah anggaran penanganan bencana tersedia sesuai dengan kebutuhan para korban. Apakah pemerintah punya dana persiapan untuk kejadian yang bersifat mendesak atau situasi bencana.
10	Bantuan pemerintah untuk korban bencana, apakah berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

Sumber: Achen dan Bartels, 2002,2014,2016.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa bencana dapat menjadi batu sandungan dukungan secara politik bagi para kandidat pada masa transisi pemulihan pasca bencana. Manajemen bencana yang dilakukan oleh kandidat sangat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan meraih kemenangan dalam kontestasi kekuasaan. Kinerja pemerintah atau petahana menjadi bahan evaluasi masyarakat untuk memberikan penilaian, apakah memberikan penghargaan atau penghukuman kepada para kandidat. Distribusi bantuan tidak secara merata, tidak efektif dan efisien, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, keterbatasan sumber daya pengelola penanganan bencana serta lemahnya perencanaan dan keterbatasan anggaran akan berdampak terhadap keberhasilan penanganan bencana. Kemampuan kinerja yang cenderung buruk akan menjadi batu sandungan para kandidat dalam kontestasi pemilihan.

Kegagalan petahana dalam mempertahankan kekuasaan politiknya menunjukkan bahwa dalam situasi diperlukan manajemen bencana yang komprehensif. Ketidakmampuan petahana meyakinkan pemilih adalah bentuk dari resistensi (perlawanan) masyarakat terhadap kebijakan petahana dalam mengelola isu bencana. Resistensi dicirikan dengan kultural, sebab munculnya dapat melalui ekspresi serta sikap pada saat menentukan pilihan pada pemilihan.

2.2.3 Perdebatan Konseptual Kontestasi Politik Dalam Konteks Bencana

Dalam konteks demokrasi, pemilu merupakan instrumen untuk menciptakan kedamaian sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam teori Kant, bahwa demokrasi merupakan kekuatan penting bagi perdamaian, dalam esainya berjudul "*Perpetual Peace*", yang diterbitkan pada tahun 1795, merujuk pada kecenderungan alamiah negara yang menjalankan tugasnya dalam bentuk republik liberal karena sistem pemerintahan yang demikian memberikan legitimasi bagi pemimpin politik, dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap negara (Greg Sorensen, 2003).

Bencana alam tidak hanya menyebabkan rusaknya ekosistem alam yang ada, namun juga bisa menyebabkan rusaknya tatanan demokrasi suatu bangsa. Seperti kejahatan perang dan kekerasan, sebagaimana teori Emile Durkheim dan Hannah Arendt bencana alam dapat meninggalkan situasi kacau seperti kehancuran sistematis atas pluralitas dan spontanitas manusia. (Arendt, 1967). Perjuangan untuk *survive* merupakan unsur dominan dalam hakikat manusia. Setiap orang berjuang untuk kepentingan terbaiknya, karena itu manusia harus diikat bersama-sama dan tunduk kepada suatu pemerintahan umum. Perjanjian-perjanjian yang harus dihargai oleh kekuatan sipil sehingga ketidakpercayaan tidak menyebabkan kehancuran dan frustrasi (Hobbes, 1952).

Merujuk pada pemikiran yang lain, bahwa gagalnya kepemimpinan politik identik dengan kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan dan berbagai persoalan sosial lainnya. Kepekaan kepemimpinan akan situasi akan menentukan keberlangsungan kepemimpinan seseorang dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Kepemimpinan yang berpegang teguh pada rasa

masyarakat yang menginginkan perubahan pasti akan mendapatkan penghargaan oleh pemilih (Khor, 2005).

Perhitungan kekuasaan dan politik berujung pada kualitas memahami jika semua hal harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT adalah sebuah kepercayaan untuk menguji sejauhmana para pemimpin dapat memegang teguh amanah berdasarkan Al'quran dan Hadis, dimana sikap harus selalu memiliki pikiran positif terhadap umat manusia, serta menghindari sikap dan perilaku melawan pemimpin yang terpilih secara sah merupakan cerminan etika politik yang harus di junjung tinggi oleh para pemimpin bangsa. Dalam pandangan agama kekuasaan dan politik itu senantiasa direfleksikan bergandengan dengan rasa kemanusiaan, Khaldun, (2011). Bencana alam tidak hanya merugikan secara fisik dan psikologis manusia namun juga dapat menguntungkan kelompok tertentu dalam konteks politik untuk mendapatkan dukungan publik.

2.2.4.1 Beberapa Gagasan Dasar Krisis Elektoral Dalam Perspektif Bencana

Bencana dalam konteks ini merujuk pada alam yaitu gempa bumi, yang tidak memiliki kaitan dengan tindakan manusia sebagai penyebab terjadinya, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan alam lainnya, namun memiliki dampak terhadap kondisi sosial dan politik suatu daerah. Menurut Khalik, menjadi persoalan yang tidak akan pernah pudar. Ia akan hadir bersama menemani eksistensi peradaban manusia. Mengintip, mengancam, menghancurkan, serta meniadakan adalah karakter laten yang melekat pada. (Ahsanul Khalik, 2022:216).

Bencana alam yang kita pahami selama ini hanya pemahaman pada sebuah tindakan manusia baik itu ada unsur kesengajaan maupun diluar unsur yang terjadi secara berkelanjutan sehingga dapat memicu bencana alam (Joel C. Gill dan Bruce

D. Malamud, 2017). Karena penelitian ini berfokus pada isu sosial yaitu bencana dan pemilu, maka jika dilihat dari relasi (hubungan) pemilu pasca pemulihan maka definisi yang digunakan adalah perspektif kajian ilmu sosial politik.

Dinamika politik dan demokrasi merupakan masalah sosial karena hampir setiap perhelatan pesta demokrasi di seluruh penjuru dunia meninggalkan catatan sejarah yang beragam. Menurut Parrillo masalah sosial bersandarkan pada empat aspek yang tidak dapat di lepaskan secara terpisah, adapun komponen tersebut, terlihat pada poin di bawah ini : (Vincent Perillo Et Al N, 1987).

1. Persoalan sosial dikatakan sebagai sebuah masalah apabila hal itu dapat bertahan pada suatu waktu tertentu dengan berbagai dinamika yang dilalui. Suatu masalah yang memiliki tingkat keterbatasan waktu atau terjadi hanya bersifat periodik jangka pendek tidak dapat dikatakan sebagai persoalan sosial masyarakat.
2. Persoalan sosial dikatakan sebagai sebuah permasalahan apabila kondisi tersebut dapat dirasakan dan memiliki daya kerusakan serta kerugian yang nyata pada kehidupan sosial masyarakat. Kerugian ini dapat berupa fisik ataupun yang bukan fisik.
3. Persoalan sosial akan pakem dinyatakan menjadi suatu peristiwa sosial jika melanggar tatanan kehidupan dan nilai-nilai yang merupakan pondasi dari kehidupan sosial masyarakat yang berjalan sangat lama.
4. Sebuah permasalahan dapat dikatakan masuk menjadi kategori permasalahan sosial apabila mengakibatkan tatanan yang menyatu menjadi terpisah atau adanya disintegrasi dan perpecahan.

Suseno, dalam bukunya “Etika Politik” menegaskan bahwa kehadiran negara dalam kekuasaan politik adalah untuk mengatur masyarakat. (Frans Magnis Suseno, 2023). Negara mempunyai fungsi mengatur berbagai tatanan kehidupan manusia baik itu yang bermakna baik maupun tidak baik. Keberadaan negara selalu memaksa publik untuk sedapat mungkin mereka menjaga hak mereka sebagai warga negara. Hobbes menyebut bahwa pada dasarnya manusia hidup di dunia ini sesungguhnya adalah sebuah medan laga manusia dengan manusia lainnya. Dalam karya monumental nya *Leviathan*, Hobbes menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hasrat besar terhadap kepentingan pribadi. (Hobbes, 1986). Akhirnya, tujuan politik secara modern bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan yang dimiliki oleh negara beralih pada tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan berpedoman pada aturan hukum yang pro pada kepentingan publik bukan pada kekuasaan penguasa.

Satu aliran perkembangan mengarah pada apa yang oleh Friedrich and Brzezinski (1965) disebut sebagai negara “totaliter” yang mencoba menghapuskan keseluruhan masyarakat sipil dan mengkoordinasikan individu-individu yang terjalin pada tujuan-tujuan politiknya sendiri (Fukuyama, 2005). Suatu gerakan yang aktif melawan kezoliman memiliki hubungan terhadap kedudukan politik maupun ekonomi sebuah negara (Landsberger, 1982). Fungsi negara hukum memberikan keamanan dan kenyamanan warga negara dalam berkaktifitas serta menciptakan kesejahteraan yang adil. Negara tidak hanya bermakna sebagai penjaga kehidupan bagi warga negaranya tetapi juga harus mampu memberikan layanan yang maksimal pada masyarakat. Negara selalu hadir pada setiap sendi

kehidupan sosial masyarakat guna menjamin hak-hak mereka sebagai warga (Giddens, 1988).

Setiap menjalankan pemilihan wajib melibatkan pihak lainnya tidak dapat dilakukan oleh kelompok tertentu namun membutuhkan banyak pihak yang terlibat. Proses menuju kondisi yang lebih baik akan dapat dicapai jika melibatkan berbagai pihak untuk saling bergandengan tangan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada (Zaltman, 1972). Keuntungan membangun kerjasama dengan berbagai pihak adalah melibatkan pihak non pemerintah dalam membangun negara secara bersama. Dalam hal, situasi bencana dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat akan memberikan keuntungan sendiri terhadap proses masa peralihan pada wilayah-wilayah yang terkena bencana. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk mencari solusi kolektif terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana yang terjadi.

Schumpeter menjelaskan bahwa demokrasi secara konseptual pada dasarnya sangat sederhana bahwa keterpenuhan hak-hak masyarakat yang dilaksanakan secara langsung, bukan ketergantungan akan kebijakan yang dibuat oleh negara yang kemudian tidak berpihak pada mereka. Pemaknaan terhadap demokrasi merupakan cara untuk memilih system pemerintahan yang memiliki proses yang ideal melalui kompetisi. Dengan, memilih wakilnya secara langsung rakyat akan merasa bahwa kedaulatan itu sesungguhnya pada mereka bukan pada penguasa (Ilham Yamin, 2012).

Huntington, (1995), dalam demokratisasi gelombang ketiga, ada empat pola demokratisasi. Pertama, *Transformation*, pola perubahan yang dilakukan dari atas atau elite politik, Kedua, *Transplacement*, perubahan dengan menggunakan pola

melalui kompromi dengan kekuatan yang seimbang antara pemerintah dengan kekuatan masyarakat, Ketiga, *replacement*, pola perubahan dari kekuatan masyarakat. Klingemann, negara yang mapan secara aspek ekonomi ataupun kematangan politiknya terlihat dari apa yang dijanjikan dan dapat diwujudkan secara nyata (Klingemann, 1999). Khaldun, melihat bahwa rumusan kekuasaan bermuara pada pemaknaan bahwa politik harus dimaknai sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada pada Al-quran yang tidak boleh melenceng. Undang-undang yang telah dibuat dilaksanakan untuk kemaslahatan umat manusia tidak tebang pilih. Menjaga masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dengan cara merangkul dan mengayomi secara baik (Khaldun, 2011).

Khaldun menitikberatkan pada bagaimana kekuasaan serta politik tunduk pada prinsip responsibilitas dan amanah dari Allah SWT untuk melaksanakan setiap aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan umat. Melaksanakan segala sesuatu yang menjadi perintah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan merupakan wujud nyata dari taat kepada Allah SWT dalam berkehidupan. Seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan merangkul berbagai kelompok, menegakan hukum, toleransi, taat pada pemimpin, mengedepankan aspirasi sebagai landasan pengambilan keputusan publik, serta membebaskan atau mengangkat kelompok yang lemah (mengentas para *mustadh'afin*) dalam berkehidupan. Politik merupakan instrumen untuk menciptakan kekuasaan yang selalu memiliki ikatan rasa kemanusiaan (Khaldun, 2011).

2.2.4.2. Krisis Elektoral Dalam Situasi Bencana

Krisis hegemoni atau krisis umum dalam negara menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, namun dalam banyak kesempatan gagasan tersebut dipandang bermanfaat, terutama dalam pembahasan pemilu dalam situasi. Gramsci dipandang memberikan landasan diskusi pemilu dalam konteks bencana. Hal ini berlaku dalam pandangan Gramsci tentang pemilu dalam situasi krisis sebagai, seperti yang dikemukakan dalam teorinya krisis otoritas”. Inilah yang disebut Gramsci sebagai “*krisis hegemoni*, atau krisis umum dari negara’ (Gramsci, 1976). Menurut Myron Weiner, partai politik merupakan suatu cara untuk melihat dinamika masyarakat yang terus mengalami perkembangan yang semakin luas dengan berbagai hal yang mengikutinya Palomba dan Weiner, 1994).

Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor munculnya krisis dalam legitimasi sebuah kepemimpinan dalam pandangan (Lucian, 1971) meliputi:

1. Peralihan kewenangan kepada kewenangan lainnya merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kewenangan yang lama secara perlahan akan kehilangan akan kepercayaan oleh publik.
2. Terjadinya persaingan yang sangat kuat namun tidak memiliki nilai yang baik karena pemimipin pemerintahan mengalami keretakan pada internal pemerintahan sendiri. Hal ini akan berdampak pada sytem kerja yang akan mengalami gangguan
3. Ketidakmampuan pemerintah dalam pemenuhan janjinya akan secara otomatis akan kehilangan dukungan dan kepercayaan publik.

4. Perubahan kewenangan melalui sosialisasi akan menimbulkan rasa partispai yang akan menurun secara politiknya karena dianggap tidak memiliki rasional dan daya tangkap yang kritis

Bentuk kekecewaan inilah yang mendasari pemilih untuk menentukan sikap pada petahana maupun calon lain dengan cara memberikan hukuman (restropeksi buta, memberikan penghargaan (retrospeksi penuh perhatian) Bechtel dan Hainmueller (2009) dan atau memberikan dukungan terhadap sikap politik yang memang ada sebelumnya pada diri pemilih (retrospeksi partisan) Boris Heersink dkk (2021) dan Kosta Bovan dkk, (2018).

Dalam perspektif Manifesto Komunis, Karl Marx melihat secara historis bahwa sejarah masyarakat merupakan perjuangan kelas dalam bahasa Marx disebut Proletar dan borjuis (Marx, 1988). Sedangkan dalam pandangan Rousseau pemerintah hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Pemerintah merupakan instrumen untuk melayani kepentingan publik berdasarkan kehendak umum. Hal tersebut sesuai dengan konsep demokrasi bahwa pemerintah adalah kepanjangan rakyatnya (Rousseau, 2010). Fukuyama menerangkan bahwa negara mempunyai tujuan yang baik untuk kepentingan umum. Dengan kekuasaan pemerintah memaksa masyarakat untuk patuh dan tunduk guna tercapainya keamanan dan rasa aman bagi warga negara.

Kekuasaan yang dimonopoli oleh negara dapat kemungkinan melepaskan diri dari pertarungan manusia dengan manusia yang lainnya. Satu aliran perkembangan mengarah pada apa yang oleh Friedrich and Brzezinski (1965) disebut sebagai negara “totaliter” yang mencoba menghapuskan keseluruhan masyarakat sipil dan

mensubordinasikan individu-individu yang teratomisasi pada tujuan-tujuan politiknya sendiri (Fukuyama, 2005). Kebebasan politik yang tidak termonopoli oleh kekuasaan akan melahirkan demokrasi yang terbuka, sehingga publik berhak menentukan hidupnya tanpa tekanan dan paksaan negara.

Dalam negara menganut sistem demokrasi modern gerakan sosial yang terakumulasi dapat menghilangkan ketidakadilan sehingga hubungan sosial, ekonomi dan politik dapat terjalin dengan baik. David Moon mengutip penjelasan voting behaviour Burnham (1988), dalam menjelaskan pedekatan ketidakhadiran pemilih pada saat pemilu, kesatu, adanya faktor secara psikologis, ditentukan oleh psikologi pemilih dan karakteristik sosial masyarakat, kedua, pemerintah mempertimbangkan asas kebermanfaatan dan kerugian atas keputusan, apakah hadir atau tidak dalam pemilu. Empat faktor tersebut terangkum menjadi anatomi psikologis masyarakat, sistem politik yang berdasarkan pada kepentingan, persepektif ekonomi dan kepercayaan secara politik

Analisis Mietzner terhadap kasus Indonesia membahas tiga strategi sebagai inovasi otoriter dalam konteks bencanaproses erosi demokrasi. *Pertama* adalah serangkaian inovasi. Kebijakan yang dirancang untuk meredam persaingan pemilu dan meningkatkan biaya partisipasi pemilu; kedua, kebangkitan politik identitas didorong oleh pihak oposisi untuk memobilisasi pemilihnya dan mendorong agenda politik yang tidak liberal; ketiga, pemerintah petahana semakin menyalahgunakan struktur negara dan hubungan baik dengan sektor media untuk membungkam perbedaan pendapat. (Fossati, 2020).

Ansell dkk. Dalam suatu krisis orang-orang mengharapkan pemimpin mereka untuk memberikan penjelasan yang berwibawa terhadap kondisi yang berlaku saat

itui serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan apa langkah yang akan diambil guna mengurangi risiko dari peristiwa itu. Dengan demikian manajemen krisis terdiri dari kebijakan respons “*actual*” dan terjalin dengan, pembuatan makna krisis melalui retorika (Masters dan t’Hart 2012). Krisis menekankan pertahanan untuk membingkai dan mengelolanya, tetapi krisis juga dapat memberikan peluang untuk keuntungan politik. Mereka dapat mengganggu “politik seperti biasa” untuk secara langsung mempengaruhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan pemilih yaitu minat, mata pencaharian, dan perhatian utama mereka. (Ahlquist et al.2020). Aspek komunikasi krisis dan pilihan strategis retorik yang diperlukan sebagai tulang punggung manajemen krisis secara keseluruhan. Ketika krisis terjadi selama kampanye pemilihan, strategi retorik petahana memainkan peran sentral dalam menyeimbangkan respons krisis dengan mengelola harapan pemilu. Akhirnya, mengikuti pendekatan ideasional, kami memahami populisme sebagai jenis wacana di mana ide-ide tertentu, khususnya anti-elitisme, dipadukan dengan gaya retorik transgresif (Canovan M: 1999).

Pemilihan dalam situasi lebih dominan mempertimbangkan sisi kebutuhan secara kemanusiaan dibandingkan dengan kebutuhan secara politik. Marx memberikan fakta bahwa manusia akan mencari rasa aman dan kenyamanan pada situasi apapun. Seperti manusia butuh akan makanan, kehidupanyang nyaman memiliki pakaian yang layak serta menjadikan hal lain di luar kebutuhan itu sebagai kebutuhan sekunder (Daniel L. Pals, 2012).

Menurut Schumpeter, 1941, Friedman, tumbuhnya kapitalisme selalu beriringan dengan pertumbuhan demokrasi, se-akan keduanya tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya secara konsep tidak dapat di satukan tetapi dalam

praktiknya berjalan berdampingan. (James Petras and Henry Veltmeyer, 2002). Melaksanakan pemilihan dalam situasi tidak menentu tentunya membutuhkan semua pihak untuk berjuang secara bersama demi terwujudnya kondisi yang kondusif, proses menuju kondisi yang lebih baik dengan melibatkan semua unsur untuk saling melengkapi satu sama lain. Memanfaatkan sumber daya yang ada justru dapat memberikan hasil yang baik terhadap pertumbuhan demokrasi yang semakin matang.

Dalam teori-teori Marx telah banyak memberikan wawasan fundamental terhadap analisis sosial yang menjadi landasan untuk memahami fenomena sosial. Teori Marx tentang struktur ekonomi dan kelas sosial menunjukan kepada kita gambaran tentang stratifikasi dan kesenjangan sosial yang sering dijumpai dalam Masyarakat. Marx sendiri berpendapat bahwa cara produksi berkaitan dengan hubungan sosial, dimana struktur ekonomi masyarakat merupakan basis nyata dari suprastruktur yuridis dan politik. (Marx, 1995.1887). Ekonomi menentukan kehidupan sosial, politik, dan intelektual, tempat terbentuknya hubungan antar manusia (Giddens, 1986). Memperkuat pandangan Marx tersebut, Durkheim dalam *The Division of Labour*, suatu masyarakat dimana setiap individu-individu hanya mengejar-ngejar kepentingannya sendiri-sendiri, akan hancur dalam waktu singkat. Dua pendekatan Marx dan Gramsci tersebut sesungguhnya menegaskan bahwa ketidakadilan ekonomi dapat menimbulkan tatanan sosial politik didalam masyarakat.

Dalam situasi krisis akibat bencana alam maupun sosial peran negara harus mampu menempatkan posisi sebagai penyeimbang kepentingan publik, seperti pandangan kelompok teori yang menyatakan bahwa negara pada dasarnya netral

merupakan kelompok teori liberal. Sedangkan yang menyatakan tidak netral adalah kelompok teori radikal. Menurut Budiman, ada tiga alasan mengapa negara berpihak, Pertama, keberadaan negara dianggap sebagai instrumen kelompok yang memiliki kekuasaan, (*Marx Klasik*). Dalam pandangan ini negara tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Dia memiliki ketergantungan pada kekuasaan yang lebih besar dari diri mereka. Kedua, kehadiran negara dianggap sebagai lembaga yang hadir secara mandiri tanpa intervensi pihak lain, sehingga berhak menentukan sikapnya secara mandiri dan otonom. Tetapi sejatinya negara bukan alat kelompok manapun (*Teori Negara Organik*). Walaupun secara kebijakan negara punya hak untuk menentukan sikap politiknya. Pemihakan ini bisa karena kedekatan psikologis antara pejabat negara memiliki misinya sendiri untuk menciptakan sebuah masyarakat yang ideal (*Teori Hegel, Teori Negara Organik, dan Teori Marxis tentang Diktator Proletariat*). Ketiga, negara pada dasarnya memiliki sikap mandiri, tetapi terikat oleh sistem ekonomi politik yang melekat (atau kondisi structural) yang membuat kemandiriannya punya keterbatasan (*Teori Poulantzas dan Block*). Bila negara memutuskan sesuatu diluar batas-batas sistem atau struktur yang ada, negara itu akan mengalami banyak kesulitan bahkan keberadaanya terancam (Budiman, 1996).

Pemikiran Gramsci dan Marx sangat membantu dalam memahami isu dalam kontestasi politik, diperlukan pandangan kritis yang komprehensif untuk melihat relasi kekuasaan dengan fakta sosial yang berkembang dan tumbuh dalam peradaban manusia. Teori pertukaran (*exchange*) sosial menjadi hal penting untuk dikemukakan dalam hal ini karena menjelaskan arti distribusi kekuasaan dalam krisis elektoral. Pemikiran kiri yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Antonio

Gramsci tentang kekuasaan memperlihatkan kepada kita bahwa dalam prakteknya kekuasaan tidak selalu didistribusikan secara adil termasuk dalam kondisi .

Dalam situasi krisis, pemahaman mengenai krisis elektoral sangat diperlukan semua pihak untuk menyadarkan pada kita bahwa proses pemulihan pasca bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab penguasa namun semua komponen masyarakat. Pemahaman secara mendalam mengenai krisis elektoral bertujuan untuk memberikan opsi terbaik dari pilihan politik yang ada (*teori rasional*). Pandangan pendekatan kiri dan kanan dianggap tidak mampu memperhatikan kompleksitas yang ada di dalam masyarakat. Kesadaran kolektif untuk bangkit dari keterpurukan pasca bencana tidak sederhana yang dibayangkan, hal hasil masyarakat mempunyai pemahaman dan definisi tersendiri tentang krisis elektoral. Perhatian terhadap isu krisis elektoral dalam konteks bencana menjadi sangat penting karena dapat memberikan alternatif terhadap persoalan krisis *elektoral* yang ada.

Dalam pandangan Stout K (2018) bahwa peristiwa yang tidak terkendali seperti bencana alam dapat menjadi penghambat peluang pemimpin petahana untuk terpilih kembali, tetapi juga menunjukkan bahwa respons yang kompeten terhadap krisis dapat juga menguntungkan petahana. Bencana merupakan sebuah peristiwa informatif dalam pemungutan suara retrospektif di mana para pemimpin memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dan dihargai oleh pemilih, sementara para pemimpin yang tidak mampu menghadapi hukuman karena kegagalan mereka menanggapi krisis. Para kandidat melihat imbalan secara elektoral yang lebih besar karena menunjukkan kompetensi ketika kerusakan akibat bencana tinggi serta ketika situasi lebih sulit pemilih dan para pemimpin dapat evaluasi oleh publik.

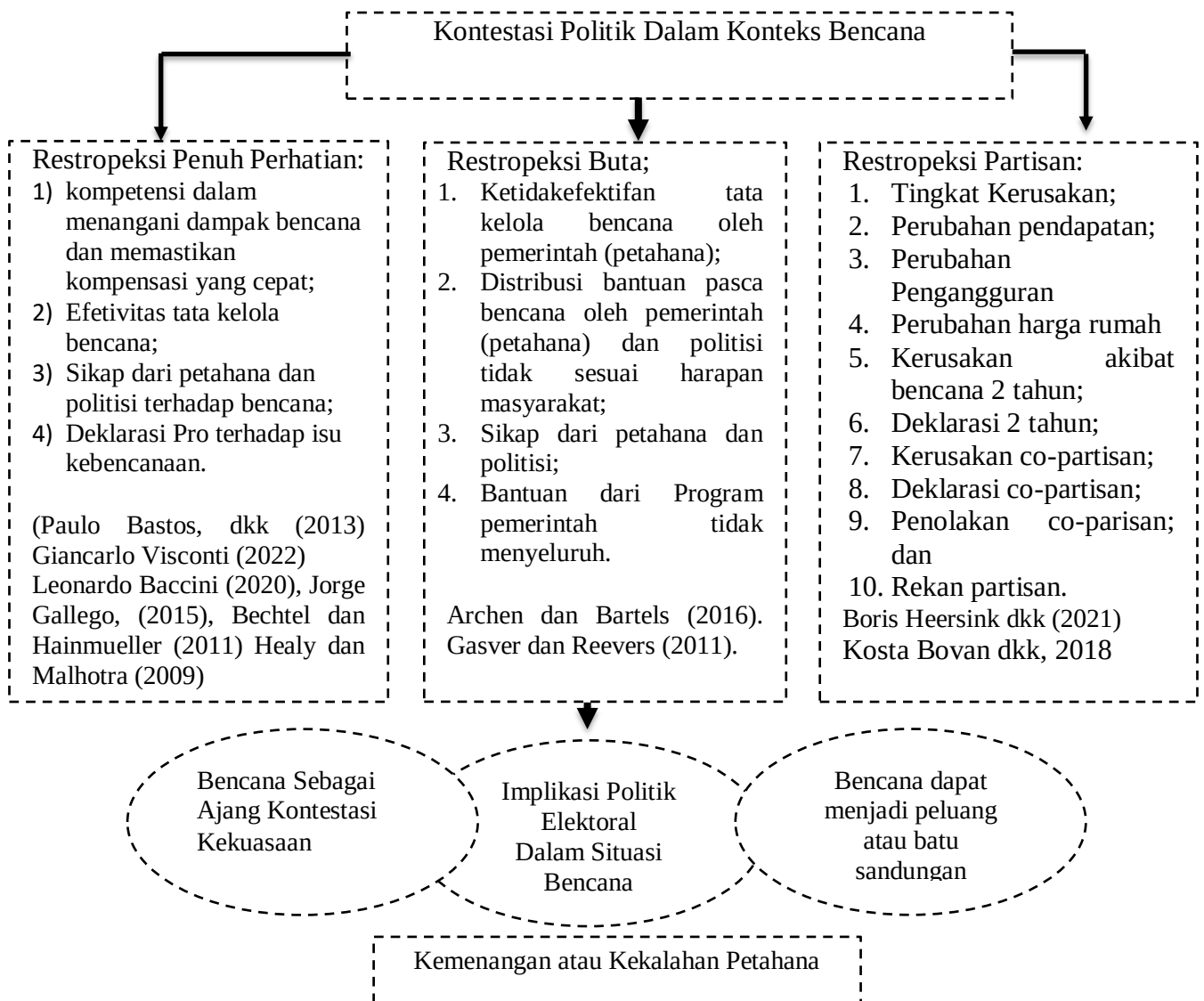
Pada akhirnya dari situasi dan krisis pemilih akan memutuskan sikap politiknya, apakah menghukum (restropeksi buta) memberikan penghargaan (retrospeksi penuh perhatian) atau justru tidak bersikap apa-apa (restropeksi partisan) terhadap sikap politik politisi. Crow (2019) berpandangan bahwa, bencana berpotensi menjadi peristiwa yang memfokuskan perhatian, yang dapat meningkatkan jumlah perhatian pada masalah terkait dan mendorong tindakan kebijakan. Hasil kajian sebelumnya menunjukkan keputusan retrospeksi, dapat berupa hasil retrospeksi penuh perhatian ataupun retrospeksi buta yang berdampak terhadap keuntungan dan kerugian elektoral kandidat pada saat kontestasi dalam pemilihan. Berbeda dari temuan sebelumnya, kajian ini memberikan hasil bahwa dalam proses pengambilan kebijakan bencana mempertimbangkan koalisi, tidak semata-mata kepentingan politik.

Bencana dapat menjadi peristiwa politik yang dapat memberikan berbagai keuntungan bagi para pihak yang punya kepentingan. Situasi pasca bencana dapat menjadi arena pertarungan para elit politik untuk mendapatkan dukungan publik. Selain itu, bencana juga dapat memberikan efek yang besar terhadap kandidat jika tidak mampu memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan publik tetapi justru menjadi batu sandungan dan bahkan dapat menjungkalkan para kandidat. oleh karena itu isu bencana memiliki ruang terbuka pada system politik modern yang tidak dapat dipandang sebagai pelengkap dalam pelaksanaan kontestasi sebuah pemilihan. Situasi krisis pasca bencana dapat menjadi medan pertempuran yang nyata bagi para kandidat bagaimana meyakinkan para pemilih ditengah situasi yang serba sulit. Politik kondisional berlaku pada momen-momen seperti ini, pasalnya bagaimana para kandidat memanfaatkan momentum untuk kepentingan

politik. Kehilangan momentum artinya kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertarungan politik sebaliknya kemampuan untuk memanfaatkan momentum dapat menjadi faktor penentu kemenangan kandidat. Dinamika politik bukan hanya persoalan strategi namun juga ditentukan dari kondisi atau dampak alam yang sedang terjadi, sehingga bagi para politisi harus menjadikan setiap momentum sebagai sebuah peluang untuk memperkuat elektoralnya.

2.2.4 Kerangka Pemikiran

Bagan 1.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah 2025

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa kontestasi politik dalam kajian teori retrofeksi buta, retrospeksi penuh perhatian dan retrospeksi partisan memberikan beberapa kesimpulan terhadap situasi, pertama, dapat memperkuat kekayaan elektoral petahana, kedua dapat memperlemah kekuatan elektoral petahana, dan ketiga, kombinasi dari ketiga teori tersebut, dengan menambahkan satu teori partisan.

2.2.5 Operasional Konsep

Dalam rangka mempermudah analisis dan membahas hasil penelitian, maka diperlukan penyusunan sebuah definisi operasional dalam penelitian. Definisi operasional sesungguhnya adalah pengembangan dari tinjauan teoritis sebagai pedoman penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian di lapangan.

1. Retrospeksi Buta merupakan bentuk penghukuman kepada petahanan yang dianggap tidak memberikan respons yang baik terhadap dampak yang terjadi atau dianggap tidak memiliki manfaat bagi pemilih. Indikator dari retrospeksi buta ini yaitu:
 - a. Ketidakmampuan tata kelola bencana oleh petahana;
 - b. Distribusi bantuan pasca bencana oleh Pemerintah/petahana tidak sesuai dengan harapan masyarakat;
 - c. Bantuan dari pemerintah tidak menyeluruh;
 - d. Bantuan pemerintah untuk korban bencana, apakah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat;
 - e. Penyaluran bantuan kepada korban bencana, berdasarkan ketepatan, kecepatan pada sasaran.

- f. Distribusi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana sudah merata atau tidak;
 - g. Struktur anggaran penanganan pasca bencana berdampak terhadap kekalahan atau kemenangan petahana;
 - h. Sumber Daya Manusia (SDM), sudah memenuhi kualifikasi dan kebutuhan pada saat masa pemulihan.
2. Retrospeksi Penuh Perhatian adalah bentuk penghargaan kepada pejabat/petahana yang dianggap berjasa dan berhasil dalam penanganan bencana. Adapun indikator dari operasional yang digunakan retrospeksi penuh perhatian ini yaitu:
- a. Kompetensi dalam menangani dampak bencana yang dimiliki oleh petahana;
 - b. Apakah proses penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat;
 - c. Apakah proses penanganan bencana sudah efektif atau tidak;
 - d. Apakah petahana melakukan deklarasi terhadap sikap menyelesaikan isu bencana sebelum pemilihan dilakukan;
3. Retrospeksi Partisan adalah bentuk penghukuman ataupun penghargaan kepada petahana berdasarkan sikap yang ada sebelum bencana terjadi, dukungan partisipan berdasarkan ideologi, agama, partai politik, kekerabatan dan kelompok. Adapun indikator dalam melihat dukungan pemilih akibat dampak terhadap perolehan suara, yaitu:
1. Tingkat kerusakan akibat bencana ;
 2. Kerusakan pada daerah co-partisan, Kerusakan rendah, sedang dan berat;

3. Perubahan Pendapatan masyarakat 1 tahun;
4. Perubahan tingkat pengangguran 1 tahun;
5. Perubahan Harga rumah, 2 tahun;
6. Kerusakan akibat 2 tahun, dan
7. Deklarasi, 2 tahun sebelum pemilihan dilakukan.
8. Deklarasi pada daerah Co-Partisan dan non koportisan
9. Penolakan Co-Partisan; dan
10. Dukungan karena sikap partisan berdasarkan kriteria: (a) Partisan berdasarkan ideologi politik; (b) Partisan berdasarkan ideologi agama; (c) Partisan berdasarkan kekerabatan/kelompok; (d) Partisan berdasarkan kesukuan dan kebudayaan;